

**ANALISA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PENGGUNA
DENGAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE***

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi sistem informasi Universitas Prabumulih



MULYA HARTA

202321026P

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP PENGGUNA DENGAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Program Studi Informatika Universitas Prabumulih

Oleh :

MULYA HARTA

202321026P

Prabumulih, 08 Juni 2026

Pembimbing I



(Fajriyah, S.Kom., M.Kom.)
NUPTK. 1159766667237103

Pembimbing II



(Ariansyah, S.Kom., M.Kom.)
NUPTK. 9343759660130163

Ketua Program Studi
Sistem Informasi



(Yuntari Purnasari, S.Kom., M.Kom.)
NUPTK. 2062766667230213

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir berupa skripsi ini dengan judul “Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim Terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale* ” telah dipertahankan dan disetujui dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabumulih pada tanggal

Prabumulih, 15 Juni 2026

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua:

Fajriyah, S.Kom., M.Kom.

NUPTK. 1159766667237103

()

Anggota:

1. Ariansyah, S.Kom., M.Kom

NUPTK.9343759660130163

()

2. Andi Christian, S.Kom., M.Kom.

NUPTK. 7148761662130203

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



(Khana Wijaya, S.Kom., M.Kom)

NUPTK. 7146768669130363

**Ketua Program Studi
Sistem Informasi**



(Yuntari Purba Sari, S.Kom., M.Kom)

NUPTK. 2534757658231052

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MULYA HARTA

NIM : 202321026P

Program Studi : SISTEM INFORMASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tugas akhir ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak terdapat karya orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini hasil *plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.



Prabumulih, 08 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



MULYA HARTA

NIM. 202321026P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“LELAH BOLEH SINGGAH, TAPI MENYERAH BUKAN PILIHAN BAGI JIWA YANG TELAH BERJUANG SEJAUH INI”

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan dan lainnya, karena-Nya lah akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Maka, pada kesempatan kali ini, akan saya persembahkan karya ini untuk:

1. Ayah H. Yuhni, M.Pd dan (Almh) Ibu Hj. Asmawati sumber inspirasi utama dalam setiap langkah kehidupan saya, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan baik secara moral maupun material, serta ketulusan doa yang tiada hentinya kepadaku. Semangat, pengorbanan, dan keikhlasan kalian menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan pendidikan ini.
2. Suami tercinta H. Anugrah Ramadhan, S.T, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk terus bertumbuh mewujudkan impian dan cita-cita yang dulu sempat tertunda. Terima kasih telah menjadi investor utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Anak - anak tersayang Adiba Siti Shakila Ramadhani dan Adreena Siti Lashira. Terima kasih untuk segala pengertiannya. Umma ingin perjuangan ini bisa menjadi motivasi dan teladan untuk kalian dalam menuntut ilmu.
4. Adik - adik kesayangan Nurrukmana, S.E , Pidadari, S.T., M.Arch, Mutia Barokahni Adha, S.Kom yang telah memberikan doa, perhatian, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kasih karena kalian saya tetap semangat menyelesaikan impian dan cita- cita yang lama tertunda.
5. Ombai, Bunbun Ade dan keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan.
6. Pak Camat Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si serta rekan - rekan kerja di kantor Kecamatan Lubai yang telah memberikan banyak support dan bantuan selama pendidikan.

7. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komputer, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta nilai-nilai integritas dalam proses pembelajaran selama masa studi.
8. Teman seperjuangan angkatan transisi 2023 sekaligus teman seperjuangan di pranata komputer. Perjuangan panjang ini akan berbuah manis dan pahitnya penundaan kenaikan pangkat akan menjadi kenangan terindah saat nanti kita sudah mencapai puncak.
9. Sahabat kampus saya, terimakasih atas setiap dukungan, tawa, dan semangat yang selalu kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Kalian hadir sebagai tempat bercerita, berbagi lelah, dan menjadi penguat ketika perjalanan akademik terasa berat. Kehadiran kalian membuat proses ini lebih ringan, lebih bermakna, dan penuh warna.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya, terimakasih telah menjadi tempat saya kembali di saat dunia terasa terlalu berat. Kalian menyaksikan banyak hal dalam perjalanan ini termasuk ketika saya sering menangis, bercerita, dan meluapkan segala keluh kesah tanpa perlu takut dihakimi.
11. Kepada sahabat sekaligus penasihat terbaik saya yang selalu mendoakan dengan tulus dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah. Terima kasih untuk doa dan *supportnya*.

ABSTRAK

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Muara Enim bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Namun, keberhasilan adopsi sistem informasi ini sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan pengalaman pengguna (ASN) dalam berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat *usability* (daya guna) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Muara Enim dari sudut pandang pengguna akhir.

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), yang merupakan instrumen standar untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan, fungsi, dan tingkat kepuasan suatu sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terstandar kepada sampel pengguna aktif yang merepresentasikan berbagai instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Hasil pengolahan kuesioner akan menghasilkan skor *usability* yang mencerminkan tingkat kelayakan sistem, baik dari aspek kemudahan penggunaan (*learnability*), tingkat kecepatan penggunaan sistem (*efficiency*), tingkat kemudahan pengguna mengingat penggunaan sistem setelah lama tidak digunakan (*memorability*), tingkat kesalahan pengguna (*errors*), tingkat kepuasan pengguna (*satisfaction*). Skor ini kemudian dikonversikan ke dalam kategori penilaian SUS, seperti *acceptable* (diterima), *grade scale*, dan *adjective ratings*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan antarmuka yang sering dialami oleh pengguna.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana sistem informasi pemerintahan daerah telah memenuhi standar kenyamanan pengguna. Selain itu, temuan dan evaluasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi rancangan perbaikan antarmuka (*user interface*), sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim ke depannya.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Analisis Pengguna, System Usability Scale, Usability Testing, Pemerintah Kabupaten Muara Enim.*

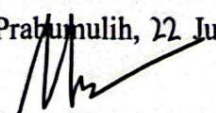
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim Terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*”**. Proposal/Laporan Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Program Studi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabumulih. Penulis banyak menerima bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih
2. Bapak Khana Wijaya, S.Kom., M.Kom selaku Dekan Fakultas Universitas Prabumulih.
3. Bapak Ariansyah, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi
4. Ibu Fajriah, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi serta sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sistem Informasi .Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabumulih.
6. Bapak /Ibu staf administrasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabumulih.
7. Bapak Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si selaku Camat Lubai dan seluruh staf Kecamatan Lubai.

Penulisan Proposal ini masih terdapat kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Proposal.

Prabumulih, 22 Juni 2026


Mulya Harta, A.Md
NIM 20232102

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Perumusan Masalah	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.5.1 Tujuan Umum	3
1.5.2 Tujuan Khusus	3
1.6 Manfaat Penelitian	3
1.6.1 Bagi Peneliti.....	3
1.6.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim	3
1.6.3 Bagi Pengguna	4
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	4
1.8 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Analisis Sistem.....	6
2.1.2 Sistem Informasi	6
2.1.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	7
2.1.4 Usability.....	8
2.1.5 Sistem Usability Scale	9
2.1.6 Populasi.....	9
2.1.7 Sampel.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Pikir	14
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	15
3.1 Objek Penelitian.....	15
3.1.1 Sejarah Kabupaten Muara Enim	15
3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim.....	16
3.1.2.1 Visi	16
3.1.2.2 Misi	16
3.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim	17

3.2 Metode Penelitian	20
3.2.1. Sumber Data	21
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	21
3.2.3 Penentuan Responden.....	24
3.2.4 Metode <i>System Usability Scale</i>	25
3.2.5 Variabel Penentu <i>Usability</i>	26
3.2.6 Bahan Penelitian.....	27
3.3 Teknik Analisis Data.....	27
3.3.1 Uji Validitas	27
3.3.2 Uji Reliabilitas	27
3.3.3 Perhitungan Skor <i>System Usability Scale (SUS)</i>	28
BAB IV ANALISA SISTEM	29
4.1 Analisis Permasalahan	29
4.1.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan	29
4.2 Analisa Sistem	31
4.2.1 Tujuan Analisa Sistem	31
4.2.2 Gambaran Umum Sistem Informasi Daerah.....	31
4.3 Observasi.....	38
4.3.1 Deskripsi Objek Penelitian	38
4.3.2 Distribusi Jawaban Responden	39
BAB V IMPLENTASI	41
5.1 Uji Validitas	41
5.2 Uji Realinilitas	43
5.3 Pembahasan Hasil Kuisisioner	44
5.4 Pembahasan Perhitungan <i>System Usability Scale (SUS) Score</i>	51
5.5 Wawancara.....	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Daftar Pernyataan <i>System Usability Scale (SUS)</i>	22
Tabel 3.2 Skala <i>Linkert</i>	24
Tabel 3.3 Kriteria Partisipan	25
Tabel 3.4 Keterangan <i>SUS Score</i>	26
Tabel 4.1 Distribusi jawaban Responden.....	39
Tabel 5.1 Distribusi Nilai rtabel Siginifikansi 5% dan 1%.....	41
Tabel 5.2 Tabel Hasil Jawaban Kuisisioner Responden.....	44
Tabel 5.3 Rekapitulasi Hasil Responden	47
Tabel 5.4 Hasil Skor <i>SUS</i> SIPD	51
Tabel 5.5 Kesimpulan Hasil Wawancara	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	17
Gambar 3.2 Metode SUS	25
Gambar 3.3 <i>SUS Score</i>	26
Gambar 4.1 Halaman Utama SIPD Kabupaten Muara Enim.....	32
Gambar 4.2 Tampilan Beranda SIPD.....	32
Gambar 4.3 Tampilan SPP.....	34
Gambar 4.4 Tampilan SPM	34
Gambar 4.5 Tampilan SP2D	35
Gambar 4.6 Tampilan BKU	36
Gambar 4.7 Tampilan Laporan	37
Gambar 4.8 <i>Chart</i> Jenis Kelamin Responden.....	38
Gambar 5.1 <i>Output</i> Correlation Uji Validitas SPSS	42
Gambar 5.2 <i>Output</i> Uji Realibilitas SPSS.....	44
Gambar 5.3 Perhitungan <i>System Usability Scale</i>	51
Gambar 5.4 Tampilan Awal SPM.....	54
Gambar 5.5 Tampilan SPM Rekomendasi.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Pengesahan	iii
Lampiran 2. Halaman Persetujuan	iv
Lampiran 3. Pernyataan Integritas	v
Lampiran 4. Motto dan Persembahan	vi



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SUS	: <i>System Usability Scale</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
SIG	: Sistem Informasi Geografis
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ATK	: Alat Tulis Kantor
WEB	: <i>World Wide Web</i>
PHP	: <i>Hypertext Preprocessor</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perda	: Peraturan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
BUD	: Bendahara Umum Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
BKU	: Buku Kas Umum
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
NIP	: Nomor Induk Pegawai
UP	: Uang Persediaan
GU	: Ganti Uang
TU	: Tambah Uang
LS	: Langsung
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
ASN	: Aparatur Sipil Negara
STS	: Sangat Tidak Setuju
TS	: Tidak Setuju
N	: Netral
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebuah platform resmi yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Muara Enim.

Namun demikian, keberhasilan implementasi suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur atau regulasi yang mengatur penggunaannya, tetapi juga oleh tingkat *usability* atau kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Apabila sistem sulit digunakan, membingungkan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna lapangan, maka kinerja pegawai dapat terhambat dan tujuan penerapan SIPD tidak tercapai secara optimal.

Di Kabupaten Muara Enim, SIPD telah digunakan oleh berbagai perangkat daerah dalam proses pengelolaan data perencanaan dan keuangan. Meski demikian, masih terdapat indikasi permasalahan yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan sistem, seperti keterbatasan sistem terutama fitur yang terdapat di sistem (*User Interface*) yaitu kesulitan alur sistem, tidak konsistennya tampilan serta kebutuhan adaptasi sistem cukup lama. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi yang lebih terukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan dan kenyamanan pengguna terhadap SIPD.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur *usability* adalah *System Usability Scale (SUS)*. *System Usability Scale (SUS)* dipilih karena kemampuannya dalam memberikan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek

usability dalam waktu singkat dan sederhana (Feishal Azriel Arya Putra et al., 2025). *System Usability Scale (SUS)* dipilih karena fokus pada keterlibatan pengguna akhir dalam pengujian, sehingga memberikan perspektif yang relevan dengan pengalaman nyata pengguna. Kuesioner yang digunakan dalam metode ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1 hingga 5. Jumlah responden yang dibutuhkan dalam metode ini tidak terlalu banyak, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan standar industri metode ini dapat diandalkan untuk menguji kepuasan pengguna selama lebih dari 30 tahun (Kholifah, Heryana, Nugraha, 2023).

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*” yang berfokus pada *User interface* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan SIPD, mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu dari hasil observasi kepada pengguna Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim diketahui bahwa terdapat masalah terkait *User Interface (UI)* pada Sistem Informasi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

1. Antar muka sistem belum sepenuhnya intuitif sehingga membutuhkan waktu bagi pengguna baru.
2. Ditemukan tidak konsistennya pada menu, istilah dan tampilan antar modul sistem.
3. Belum dilakukannya pengukuran *Usability System* secara terstruktur dan terstandar dari sudut pandang pengguna dan tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna terhadap SIPD Kabupaten Muara Enim yang diketahui secara kuantitatif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :“ Bagaimana Melakukan Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale (SUS)*”.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka ruang lingkup masalah difokuskan pada Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan Kabupaten Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale (SUS)* yang berfokus *User Interface (UI)*

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus :

1.5.1 Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis tingkat *usability* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim berdasarkan persepsi pengguna menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)*.

1.5.2 Tujuan Khusus

Mengukur tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) SIPD Kabupaten Muara Enim melalui perhitungan skor *System Usability Scale (SUS)*.

1. Mengidentifikasi aspek-aspek SIPD yang dinilai efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna, serta aspek yang masih menimbulkan kesulitan dalam penggunaan.
2. Menganalisis persepsi pengguna terhadap kinerja sistem, serta pengalaman keseluruhan dalam mengoperasikan SIPD.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan penggunaan SIPD berdasarkan hasil analisis SUS.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai konsep *usability*, metode *System Usability Scale (SUS)*, serta penerapannya pada sistem informasi pemerintahan.

1.6.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

1. Menyediakan informasi yang objektif mengenai tingkat kemudahan penggunaan SIPD di lingkungan perangkat daerah.
2. Membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi pengguna saat mengoperasikan SIPD.
3. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem, peningkatan pelatihan, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital.

1.6.3 Bagi Pengguna

Memberikan saluran evaluasi sehingga pengalaman, kendala, dan kebutuhan pengguna dapat tersampaikan secara terukur.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di laksanakan di Kantor BPKAD Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jln. Jenderal A.Yani Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat daerah tersebut merupakan pengguna aktif SIPD Penatausahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terkait tingkat usability sistem. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2025 hingga Februari 2026.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini membantu supaya skripsi lebih terarah pada masalah yang dibahas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuan yang ditetapkan dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan uraian singkat tentang latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori umum atau mendasar yang terkait dengan topik dalam penulisan ini. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai acuan atau referensi untuk memahami informasi yang terkait dengan penulisan

atau memberikan tinjauan umum tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian penulis.

Bab III Objek dan Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang latar objek/tempat dilakukannya penelitian. Dan juga membahas metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pengumpulan data, instrument penelitian, kerangka penelitian, dan metode analisa untuk mengukur tingkat *usability* suatu sistem informasi.

Bab IV Analisa Sistem

Pada Bab ini berisikan Analisa Objek, permasalahan apa saja yang ada pada sistem yang sedang berjalan.

Bab V Implementasi

Pada Bab ini berisikan tentang hasil dari Analisa dari sistem yang sedang berjalan terhadap pengguna dengan *Metode System Usability Scale*.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan temuan penelitian yang telah diinterpretasikan pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini menyajikan pembahasan tentang teori-teori dasar, konsep-konsep utama, serta penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka pemikiran yang kongkrit serta menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

2.1.1 Analisis Sistem

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisis sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi dengan cara mengamati proses input dan data proses output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasional. Analisis sistem bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang terjadi pada sistem dan bagaimana cara menangani kendala tersebut sehingga didapatkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis sistem yang dilakukan (Cantica et al., 2024).

2.1.2 Sistem Informasi

Kata “Sistem” atau Systema (bahasa latin) dan Sustema (bahasa yunani) memiliki arti sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang saling terhubung satu sama lain untuk memudahkan aliran informasi, energi maupun materi. Menurut O’Brien, James and Marakas yang dikutip oleh (Puteri Anindya Maulan & Dendy Kurniawan, 2022). Sistem adalah sekelompok komponen yang bekerja sama dan berhubungan dimana terdapat input serta menghasilkan output didalam proses transformasi yang teratur untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem adalah beberapa elemen yang berhubungan dan akan menghasilkan sesuatu.

Menurut Prabowo dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis, menyatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Menurut Mulyani dalam jurnal Metode Analisis dan Perancangan Sistem, menyatakan bahwa

informasi merupakan data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi ataupun siapa saja yang membutuhkan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah data yang diolah dari satu atau berbagai sumber yang memberikan nilai dan manfaat bagi penerima (Sitorus & Sakban, 2021).

Kualitas Informasi menurut Menurut McLeod (Diana Ratna Sari, Agus Pitoyo, 2023) mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akurat : Informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Tepat Waktu : Informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
3. Relevan : Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada diberbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.
4. Lengkap : Informasi harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan.

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian lain dari sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Manullang et al., 2021).

Dapat disimpulkan peneliti bahwa Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling bekerja sama secara terpadu dalam pengolahan data untuk memperoleh informasi dengan maksud dan tujuan tertentu sebagai bahan masukan mengambil keputusan.

2.1.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah menurut Putri yang dikutip oleh (Vitriana et al., 2022).

2.1.4 Usability

Usability merupakan sebuah kebergunaan yang jika digunakan dalam situs *website*, untuk menguji sejauh mana kebergunaan *website* tersebut bagi pengguna (*user*) dengan memperhatikan ke efektifan, efisiensi dan kepuasannya. Namun ada banyak sekali definisi mengenai *usability*, berikut ini beberapa definisinya :

1. Definisi menurut *ISO (Organization For Standarization)* (9241-11) dikutip oleh (Ramadhan & Sutabri, 2023) : yakni Tingkat daya guna dari suatu produk yang digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dan memberi kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Dalam definisi menurut ISO ini berfokus pada 3 ukuran penting dari *usability* yakni efektif, efisien dan memberi kepuasan.
2. Definisi menurut Joseph Daumas dan Janice Redish dikutip oleh (Ramadhan & Sutabri, 2023) *usability* digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman penggunaan ketika berinteraksi dengan produk sistem baik itu *website*, *software*, *mobile phone* ataupun yang lainnya. Dan secara umum *usability* mengacu kepada bagaimana pengguna bisa mempelajari dan menggunakan produk untuk memperoleh tujuannya dan seberapa puas mereka terhadap penggunaannya.
3. Menurut Jakob Nielsen dikutip oleh (Ramadhan & Sutabri, 2023) mendefinisikan *usability* sebagai pengalaman suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode ketergunaan (*usability*), yakni sebuah metode yang mengukur apakah *website* mudah dipergunakan oleh *user*, seperti efektifitas serta kepuasan pengguna dalam menggunakan *website*. pengukuran *usability* ini sendiri bersifat relatif dan sangat bergantung pada bagaimana cara peneliti menyelesaikan sekumpulan masalah yang ada pada objek penelitian. terdapat beberapa ukuran umum yang dapat dijadikan patokan dalam mengukur karakteristik *usability*, yakni (Ramadhan & Sutabri, 2023) :

1. *Learnability*, yaitu menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk

memenuhi *taks-taks* ketika pertama kali mereka melihat/menggunakan hasil perancangan.

2. *Efficiency*, menjalankan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan *taks-taks* setelah mereka mempelajari hasil perancangan.
3. *Memorability*, menjalankan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan rancangan dengan baik, setelah beberapa lama tidak menggunakannya.
4. *Errors*, menjelaskan jumlah *error* yang dilakukan pengguna, tingkat kejengkelan terhadap *error* dan cara memperbaiki *error*.
5. *Satisfaction*, menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan rancangan.

2.1.5 *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale adalah metode yang dimana biasanya digunakan untuk menilai suatu system dengan cara yaitu mengukur tingkat kegunaannya (*usability*). *SUS* sampai sekarang sangat populer dan sering dipakai atau dipilih sebagai metode dalam suatu penelitian *usability system/website*. Pada awalnya *SUS* ini dibuat oleh seseorang yang bernama John Brooke di tahun 1986, dimana metode *SUS* ini memungkinkan untuk mengevaluasi macam-macam produk serta layanan termasuk *hardware*, *software*, perangkat, selular, situs *website* dan aplikasi *mobile* (Wahyuni & Hamzah, 2024).

Metode *System Usability Scale (SUS)* adalah suatu teknik penggunaan kuesioner yang banyak digunakan untuk mengevaluasi tingkat kegunaan dari suatu sistem atau aplikasi. Teknik ini juga disebut teknik *quick and dirty* (Kholifah, Heryana, Nugraha, 2023).

2.1.6 *Populasi*

Sebelum melakukan riset, peneliti harus menentukan terlebih dahulu apa dan siapa yang akan diteliti secara menyeluruh. Karena mereka yang akan menjadi subjek dan objek serta menjadi sumber data penelitian. Lebih-lebih penelitian kuantitatif populasi dan sampel menjadi penentu keakuratan sebuah penelitian. Menurut Sinambela yang dikutip oleh (Mushofa et al., 2024) kesalahan dalam penetapan populasi akan membawa ke permasalahan serius, dimana data

yang diperoleh akan sia-sia. Oleh karena itu, peneliti harus memahami betul tentang populasi.

Dalam KBBI populasi artinya seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu; sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendapat lain menyatakan populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian (Mushofa et al., 2024).

2.1.7 Sampel

Seorang peneliti tidak mungkin meneliti keseluruhan populasi, apalagi jumlah populasinya sangat besar. Dia dapat memilih wakil-wakil dari populasi. Inilah yang dimaksud sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi (Mushofa et al., 2024).

Pendapat lain menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Mushofa et al., 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembuatan proposal skripsi ini mengacu pada beberapa jurnal serta penelitian lainnya sebagai pedoman dalam penyusunannya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Siti Nur Kholifah, Nono Heryana, H. Bagja Nugraha (2023)	“ANALISIS USABILITY PADA APLIKASI HIMFO MENGGUNA KAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)”	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, data tersebut dinyatakan valid dan reliabel.	Analisis Usability pada aplikasi di smartphone
2.	Nidya Vitriana , Agustiawan , Muhammad Ahyaruddin (2022)	“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru”	Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif.	Analisis SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi.
3	Chelsea Nadia Kurniawan , Baizul Zaman , Syamsul Bhahr (2022)	“ANALISIS USABILITY PADA WEBSITE AYOMULAI MENGGUNA KAN METODE SYSTEM	tingkat usability website Ayomulai masih perlu dievaluasi dan dikembangkan agar dapat lebih optimal penggunaannya	analisis user interface untuk mengetahui bagaimana tingkat nilai usabilitynya

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
		USABILITY SCALE”		
4	Akbar Rizki Ramadhan, Tata Sutabri (2023)	“Analisa Website SIG Radar Cuaca Dengan Metode System Usability Scale (SUS) Pada UPT BMKG”	hasil usability (kebergunaan) bernilai 77% yang berarti pengguna merasakan bahwa kebergunaan website SIG radar cuaca masih dirasa berguna jika dilihat dari segi learnability, efficiency, memorability, erorr dan satisfaction.	Hasil Analisis menggunakan seluruh variabel usability yaitu learnability, efficiency, memorability, erorr dan satisfaction.
5	Mushofa, Dina Hermina, Nuril Huda (2024)	“Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif”	Pemilihan populasi dan sampel yang tepat sangat penting dalam penelitian karena hal ini akan memengaruhi kualitas data, keakuratan hasil, serta kesimpulan yang diambil.	Penelitian dilakukan dengan library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif
6	Puteri Anindya Maulan , Dendy Kurniawan (2022)	“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTOR Y ALAT TULIS KERJA BERBASIS WEB PADA MA SABILUNN AJAH”	Pekerjaan staf tata usaha dalam mencatat dan mengolah data inventory ATK dapat dilakukan dengan mudah dan rapi	Metodelogi penelitian dengan wawancara dan observasi.
7	Jimmi Hendrik P. Sitorus , Muhammad Sakban (2021)	“Perancangan n Sistem	Hasil dari penelitian ini berupa sebuah aplikasi	Metodelogi penelitian

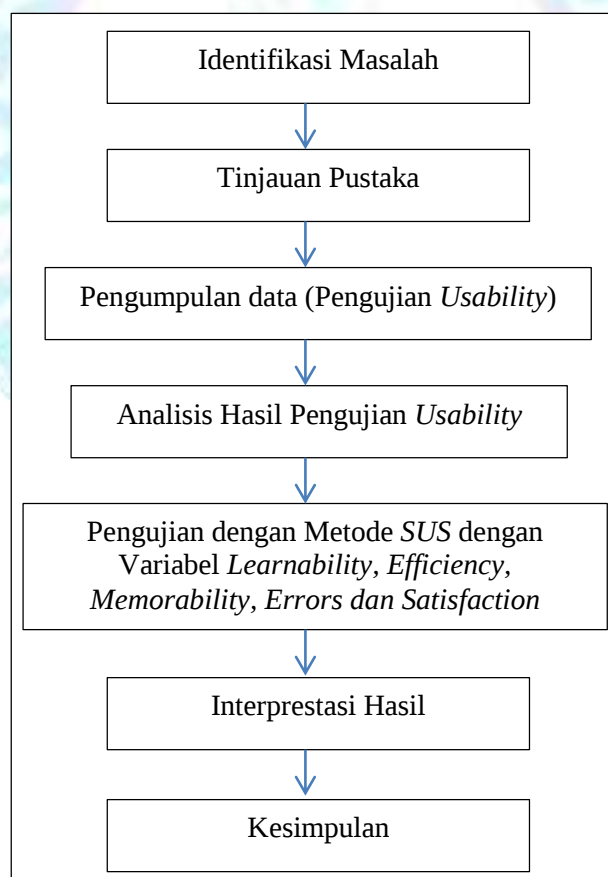
No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
		Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar”	berbasis web penjualan Furniture dapat memberikan informasi produk terbaru kepada masyarakat.	dengan wawancara dan observasi.
8	Alex Holyfiel Manullang, Mendarissan Artonang, Mufria J. Purba (2021)	“SISTEM INFORMASI BIMBINGAN BELAJAR NUMBER ONE MEDAN BERBASIS WEB”	Website ini membantu orang tua siswa dan calon siswa bimbingan belajar memberikan informasi tentang Bimbingan Belajar Number One Medan.	Metodelogi penelitian dengan observasi dan wawancara.
9	Diana Ratna Sari, Agus Pitoyo, Idayu Rahmadewi (2023)	Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Warung Pereng Kaliabank Kabupaten Kebumen	Transaksi penjualan diakomodasi oleh sistem, sehingga tidak ada lagi data yang tidak terbaca.	Bahasa pemograman menggunakan PHP.
10	Dewi Putri Cantica, Andy Hidayat Jatmika, Raphael Bianco Huwae, Dwi Ratnasari (2024)	“ANALISIS SISTEM INFORMASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA	Berdasarkan hasil perhitungan score dalam SUS dapat dikatakan bahwa sistem informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Nusa Tenggara Barat cukup dapat diterima oleh masyarakat dengan tingkat	Daerah dan Objek yang diteliti berbeda.

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
		TENGGAHA BARAT MENGUNAKAN SYSTEM USABILITY SCALE “	penerimaan yaitu marginal low dan mendapat predikat OK, sehingga ke depannya diperlukan adanya perbaikan sistem informasi agar mendapat tingkat penerimaan dan predikat yang lebih tinggi.	

(Sumber : *google scholar* ., 2025)

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah alur atau struktur logis yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, serta bagaimana peneliti menyusun pemikirannya dalam menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan segala hal yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian, yaitu aspek yang dikaji, diamati, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim khususnya Penatausahaan.

3.1.1 Sejarah Kabupaten Muara Enim

Nama “Muara Enim” berasal dari kata “Muara” yang berarti pertemuan sungai, dan “Enim” yang merupakan nama sungai utama yang membelah wilayah ini: Sungai Enim. Abad ke-13 Masehi, Islam diperkenalkan di Muara Enim. Penduduk Muara Enim zaman dahulu memiliki hubungan dagang dengan Kayu Agung dan Palembang, lagipula Muara Enim pernah menjadi wilayah Kesultanan Palembang. Saat Palembang berperang dengan Belanda, banyak tokoh agama dari pedalaman, termasuk Muara Enim, ikut mati dalam perang sehingga terjadi krisis ulama, dan kemudian Belanda menduduki Muara Enim.

Berdasarkan sejarah, Kabupaten Muara Enim pada masa pendudukan Hindia Belanda, marga-marga di sepanjang Sungai Enim, mulai dari marga Semendo Darat sampai ke marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Kemudian, marga-marga di sepanjang Sungai Lematang mulai dari marga tamblang ujan mas hingga marga sungai rotan digabung menjadi satu wilayah administratif dengan nama "Onderafdeling Lematang Ilir" yang tunduk dengan *Afdeling Palembangse Boven Landen* dengan asisten residen yang bertempat di Lahat. Batu bara mulai digali Belanda pada tahun 1919. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan nama Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo dan dibentuk wilayah administratif baru yang dikenal dengan Lematang Ogan Tengah, selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah.

Ketika masa awal kemerdekaan Indonesia, hasil sidang Dewan Keresidenan Palembang pada tanggal 20 November 1946 dalam surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, wilayah Kawedanan

Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Panitia Sembilan dibentuk untuk bertanggung jawab atas pembentukan LIOT, dan hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dengan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati LIOT tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tanggal 26 Juni 1959. Kabupaten LIOT dibentuk pada Masa Bersiap, jadi jabatan kepala daerah dipegang oleh gubernur daerah tingkat I Sumatera Selatan antara tahun 1946-1950. Bupati non-gubernur pertama Muara Enim adalah Amaludin. Pada tanggal 1 April 1980, nama Muara Enim menjadi nama baru kabupaten ini. Kemudian, 21 Juni 2001, Kota Prabumulih dimekarkan dari Muara Enim, dan pada 11 Januari 2013, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimekarkan dari Kabupaten Muara Enim.

3.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim merupakan sebagai arah dan pedoman dalam menjalankan kegiatan Operasional Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

3.1.2.1 Visi

Visi Kabupaten Muara Enim saat ini adalah "MEMBARA: Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju, Berkelanjutan".

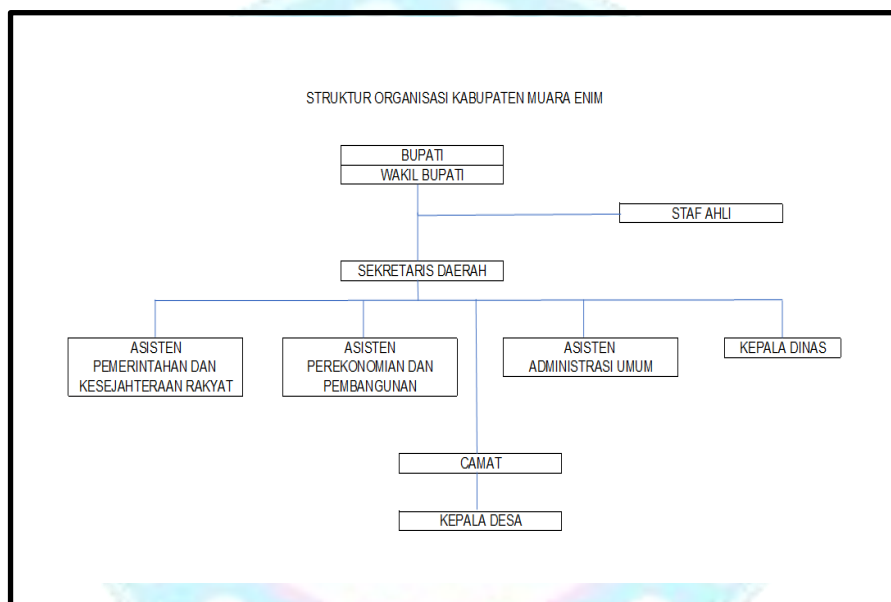
3.1.2.2 Misi

Adapun misi yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan kegiatan Pemerintahannya diantaranya yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Menciptakan SDM yang mandiri, berdaya saing, berakhlak mulia, serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh & Inklusif: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, termasuk pengembangan dunia usaha dan UMKM.

- 3) Penguatan Infrastruktur & Suprastruktur: Membangun sarana prasarana publik, permukiman, serta penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang baik.
- 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Ketahanan Bencana: Memperkuat ketahanan bencana, stabilitas keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Membangun pemerintahan yang profesional, kredibel, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

3.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim



Sumber: (Pemerintahan Kabupaten Muara Enim : 2025)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yaitu:

1. Bupati

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan sesuai undang-undang.
- Menyusun kebijakan dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) ke DPRD, termasuk APBD, RPJPD, dan RPJMD.
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- Melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD.

2. Wakil Bupati

- Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati.
- Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati jika Bupati berhalangan sementara (tahanan, sakit, dll).
- Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah.

3. Sekretaris Daerah

- Menjadi unsur staf Bupati, bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa.
- Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Asisten Administrasi Umum

- Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi.
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi.
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Dinas

- Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tertentu sesuai dinasny.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya.
- Melaksanakan pembinaan pegawai, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran di dinasny.

8. Staf Ahli

- Pemberian pertimbangan dan pemecahan masalah secara konseptual.
- Perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- Peningkatan kualitas kebijakan publik karena didasarkan analisis mendalam.

9. Camat

- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk urusan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi.
- Membantu Bupati dalam pemerintahan desa, pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

10. Kepala Desa

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- Melaksanakan Pembangunan Desa.
- Pembinaan Kemasyarakatan.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara

terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta (Charismana et al., 2022).

Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Moh. Kasiram yang dikutip oleh (Hamid et al., 2024), “penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data angka sebagai alat menganalisis data”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar tingkat kegunaan sistem berdasarkan skor *SUS*.

3.2.1 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena dari data inilah peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan (Sugiyono, 2022). Disini dapat disimpulkan sumber data primer berasal dari pengguna yang menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya yang penatausahaan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, buku, *e-book*, jurnal, penelitian terdahulu, artikel atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Sulung & Muspawi, 2024).

3.2.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian karena menentukan kualitas informasi yang akan dianalisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas pengguna di lokasi penelitian yaitu di Kantor BPKAD Kabupaten Muara Enim. Dalam pengamatan tersebut, Peneliti mengamati kegiatan penggunaannya. Untuk mempelajari proses penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan, peneliti juga mengamati penggunaan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka atau melalui media lain antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, Wawancara dilakukan kepada pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan yaitu Bendahara atau Operator SIPD. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dan pendapat pengguna tentang penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penatausahaan ini.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari buku, *e-book*, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, baik itu objek, maupun metode yang digunakan.

4. Kuisisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi sejumlah daftar pernyataan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab Menurut Fadlan yang dikutip oleh (Maria & Sutabri, 2023). Dalam hal ini peneliti memberikan kuisisioner berupa pernyataan kepada partisipan secara tertulis melalui *google form*.

Tabel 3.1 Daftar Pernyataan *System Usability Scale (SUS)*

Pernyataan	Pilihan Jawaban				
	1	2	3	4	5
	STS	TS	N	S	SS
Saya berpikir akan menggunakan <i>website</i> ini lagi (satisfaction)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa <i>website</i> ini rumit untuk digunakan (learnability)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa <i>website</i> ini mudah digunakan (memorability)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan <i>website</i> ini (learnability)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa fitur-fitur <i>website</i> ini sudah berjalan dengan semestinya (Efficiency)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada <i>website</i> ini (errors)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan <i>website</i> ini dengan cepat (learnability)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa <i>website</i> ini membingungkan (learnability)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan <i>website</i> ini (efficiency)	☐	☐	☐	☐	☐
Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan <i>website</i> ini (learnability)	☐	☐	☐	☐	☐

Dalam penelitian ini penilaian dari responden menggunakan skala *Likert* dimana terdapat 5 skala poin. Poin 1 untuk tanggapan “sangat tidak setuju” sampai poin 5 untuk tanggapan “sangat setuju”. Tabel skala linkert dapat dibuat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala *Linkert*

Pilihan Jawaban	Singkatan	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral / Ragu-ragu	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

3.2.3 Penentuan Responden

Untuk menentukan jumlah sampel, penulis memakai rumus Slovin sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan sampel. Berikut rumus Slovin perhitungannya adalah (Mushofa et al., 2024):

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, misalkan: 0,01 (1%), 0,05 (5%), 0,1 (10%).

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Penelitian ini menggunakan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 5% memiliki tingkat akurasi 95%.

Sehingga dengan Populasi sebanyak 64 orang

$$n = 64 / (1 + (64 \times 0,05^2))$$

$$n = 64 / (1 + (64 \times 0,0025))$$

$$n = 64 / (1 + 0,16)$$

$$n = 64 / 1,16$$

$$n = 55,17 \text{ dibulatkan menjadi } 55 \text{ sampel}$$

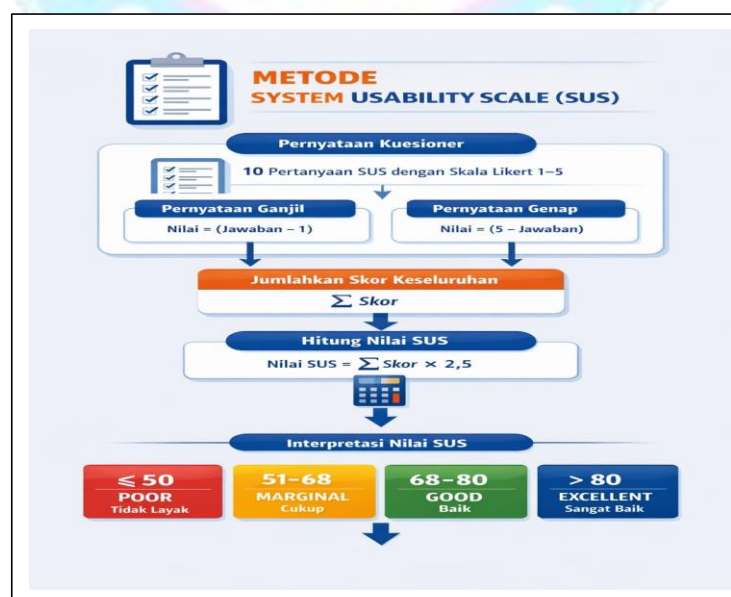
Jadi setelah dihitung menggunakan Rumus Slovin yang dikutip dari (Mushofa et al., 2024) didapatkan sampel sebanyak **55 sampel**.

Tabel 3.3 Kriteria Partisipan

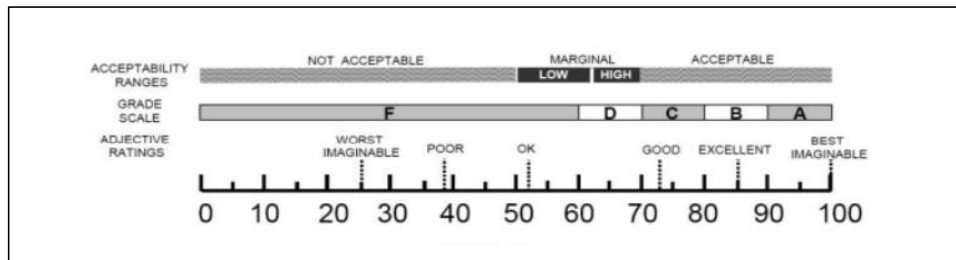
No	Kriteria
1	Pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2	Pengguna menggunakan sistem operasi pada computer
3	Memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan
4	Bersedia berpartisipasi dalam penelitian

3.2.4 Metode System Usability Scale

Metode *System Usability Scale (SUS)* adalah suatu teknik penggunaan kuesioner yang banyak digunakan untuk mengevaluasi tingkat kegunaan dari suatu sistem atau aplikasi. Teknik ini juga disebut teknik *quick and dirty*.. Kuesioner SUS terdiri dari sepuluh pertanyaan, dan hasil survei diekspresikan dalam bentuk skor tunggal pada rentang 0-100, yang membuatnya relatif mudah dipahami. Setiap pernyataan bernomor ganjil merupakan kalimat positif dan pernyataan bernomor genap merupakan kalimat yang negatif. Adapun Gambar Metode SUS dan gambar SUS Score sebagai berikut :



Gambar 3.2 Metode SUS



Gambar 3.3 SUS Score

(Sumber: Nadia Kurniawan et al., 2022)

Dari Gambar SUS Score diatas dapat dijelaskan Keterangan dari SUS Score tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.4 Keterangan SUS Score

Acceptability	Grade Scale	Adjective Ratings
Not Acceptable : 0-50	A = 91-100	Best Imagine :85-100
Marginal : 50-70	B = 81-90	Excelent : 74-85
Accepable : 70-100	C = 71-80	Good : 53-74
	D = 61-70	Poor : 25-39
	E = 0-60	Worsh Imaginable : 0-25

(Sumber: Nadia Kurniawan et al., 2022)

Keterangan skor *System Usability Scale (SUS)* diinterpretasikan dalam beragam versi diantaranya *Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjectives Rating*. *Acceptability Ranges*, skala yang dipakai yaitu *not accetapble*, *marginal*, dan *acceptable*. Pada skala *Grade Scale* digolongkan menjadi 5 (lima) yakni : grade A (skor 91-100), grade B skor (81-90), grade C (skor 71-80), grade D (skor 61 -70), serta grade F (skor dibawah 60). Kemudian *Adjectives Rating* digolongkan menjadi *adjectives* yaitu *worst imaginable*, *poor*, *good*, *excellent*, serta *best imaginable*.

3.2.5 Variabel Penentu Usability

terdapat beberapa ukuran umum yang dapat dijadikan patokan dalam mengukur karakteristik usability, yakni (Ramadhan & Sutabri, 2023) :

1. *Learnability*, yaitu menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk memenuhi *taks-taks* ketika pertama kali mereka melihat/menggunakan hasil perancangan.

2. *Efficiency*, menjalankan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan *taks-taks* setelah mereka mempelajari hasil perancangan.
3. *Memorability*, menjalankan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan rancangan dengan baik, setelah beberapa lama tidak menggunakannya.
4. *Errorrs*, menjelaskan jumlah *errorr* yang dilakukan pengguna, tingkat kejengkelan terhadap *errorr* dan cara memperbaiki *errorr*.
5. *Satisfaction*, menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan rancangan.

3.2.6 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini bahan untuk penelitian yang dapat digunakan yang kemudian dapat menjadi acuan yaitu data-data dari jawaban responden dalam kuisisioner yang meliputi (ASN pemerintah kabupaten muara enim selaku *user* dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim).

1.3 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis hasil pengujian yaitu pengolahan data yang kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini. Namun sebelum itu, dilakukan pengujian *validitas* data dan *reliabilitas* data. Uji validitas data menggunakan metode *Product Moment Pearson* dan uji reliabilitas data menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. (Kholifah, Heryana, Nugraha, 2023). Kuisisioner yang diuji menggunakan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan bantuan *SPSS for windows versi 25*.

1.3.1 Uji Validitas

Menurut Sujarweni yang dikutip oleh (Nurhakiki et al., 2024) “validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesisioner”. Analisis korelasi menggunakan metode *product moment Pearson* digunakan untuk menguji validitas, di mana validitas dapat dinyatakan jika nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel. Selain itu, validitas juga ditentukan oleh nilai signifikansi yang harus kurang dari 0,05 (Kholifah, Heryana, Nugraha, 2023).

1.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas data dilakukan, setelah itu peneliti melakukan

pengujian reliabilitas data. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat kehandalan indikator atau kuesioner apabila digunakan kembali sebagai alat ukur variabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* variabel 0,5. Jika nilai alpha melebihi 0,5 maka indikator atau kuesioner dinyatakan reliabel (Nurhakiki et al., 2024).

1.3.3 Penghitungan Skor *System Usability Scale (SUS)*

Setelah memperoleh hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian *usability testing*. Pengujian data menggunakan teknik kuesioner *System Usability Scale (SUS)* dihitung menggunakan rumus *SUS*. Untuk penghitungan skor *SUS* dilakukan dengan aturan sebagai berikut (Kholifah, Heryana, Nugraha, 2023):

1. Setiap pernyataan yang bernomor ganjil poin *SUS* nya dikurangi 1.
2. Setiap pernyataan bernomor genap, dihitung dengan cara 5 dikurangi poin *SUS* yang diperoleh.
3. Skor akhir dari penjumlahan setiap pernyataan akan dikalikan dengan 2,5.

Rumus *SUS* sebagai berikut :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

$\bar{x}$ = Nilai rata-rata

$\sum x$ = Jumlah nilai *SUS*

n = Banyaknya responden.

BAB IV

ANALISA SISTEM

4.1 Analisis Permasalahan

Analisis permasalahan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam mengetahui permasalahan pada suatu sistem informasi, karena melalui proses ini dapat diketahui berbagai kendala dan kebutuhan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Pada penelitian dengan judul “Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim terhadap pengguna dengan Metode *System Usability Scale*”, analisis permasalahan dilakukan untuk memahami kondisi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim yang sedang berjalan serta mengidentifikasi kekurangan yang ada agar dapat diperbaiki menjadi sistem yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi terutama pada *User Interface* yang mengakibatkan proses penatausahaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini menjadi tidak efektif dan efisien.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan Analisa seberapa bergunanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap pengguna dengan metode *System Usability Scale*. Dimana metode ini dapat mengukur tingkat kemudahan pengguna menggunakan aplikasi, tingkat kecepatan pengguna menggunakan aplikasi, tingkat kemudahan pengguna mengingat kembali dalam penggunaan aplikasi, tingkat jumlah *error* dalam penggunaan aplikasi, dan tingkat kepuasan pengguna menggunakan aplikasi. Metode ini dapat mengevaluasi tingkat kegunaan sistem atau aplikasi dengan menggunakan kuisisioner yang hasilnya berupa score atau nilai.

4.1.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Analisis merupakan proses penguraian suatu permasalahan yang bersifat kompleks ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui dan memahami proses-

proses yang berjalan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi alur kerja sistem yang sedang berjalan serta kebutuhan sistem yang akan diperbaiki. Adapun tahapan-tahapan sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) kepada SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
2. SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencairkan dana sesuai kebutuhan kegiatan meliputi SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang, SPP Tambahan Uang, SPP Langsung.
3. Setelah SPP diverifikasi, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai persetujuan pembayaran.
4. BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai perintah pencairan dana ke rekening tujuan.
5. Dana dicairkan dan digunakan sesuai kegiatan yang telah direncanakan.
6. Bendahara melakukan pencatatan transaksi yaitu Buku Kas Umum (BKU).
7. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bentuk akuntabilitas.
8. Dilakukan Penyusunan Laporan Keuangan serta pencocokan data antara SKPD dan BUD.

Analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dilakukan oleh peneliti melalui tahapan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sistem serta proses kerja yang berlangsung dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memahami alur proses, prosedur operasional, serta permasalahan yang muncul pada sistem yang sedang digunakan.

Untuk melengkapi dan memperkuat hasil observasi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bendahara dan Operator yang memiliki keterkaitan langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim. Wawancara dilakukan di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam mengenai

prosedur serta alur kerja sistem yang sedang berjalan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis sistem sehingga dapat menjadi dasar dalam Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim terhadap pengguna dengan metode *System Usability Scale*.

4.2 Analisa Sistem

Analisa sistem merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengevaluasi sistem, karena menentukan arah perbaikan agar sistem menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, peneliti bekerja sama secara langsung dengan pengguna dengan mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan teori yang relevan, pengumpulan data, identifikasi kebutuhan pengguna, menganalisa sistem berjalan. Berdasarkan hasil analisis sistem yang telah dilakukan, peneliti menggunakan kuisioner dalam mengukur tingkat kegunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim terhadap pengguna dengan metode *Sytem Usabilty Scale*.

4.2.1 Tujuan Analisa Sistem

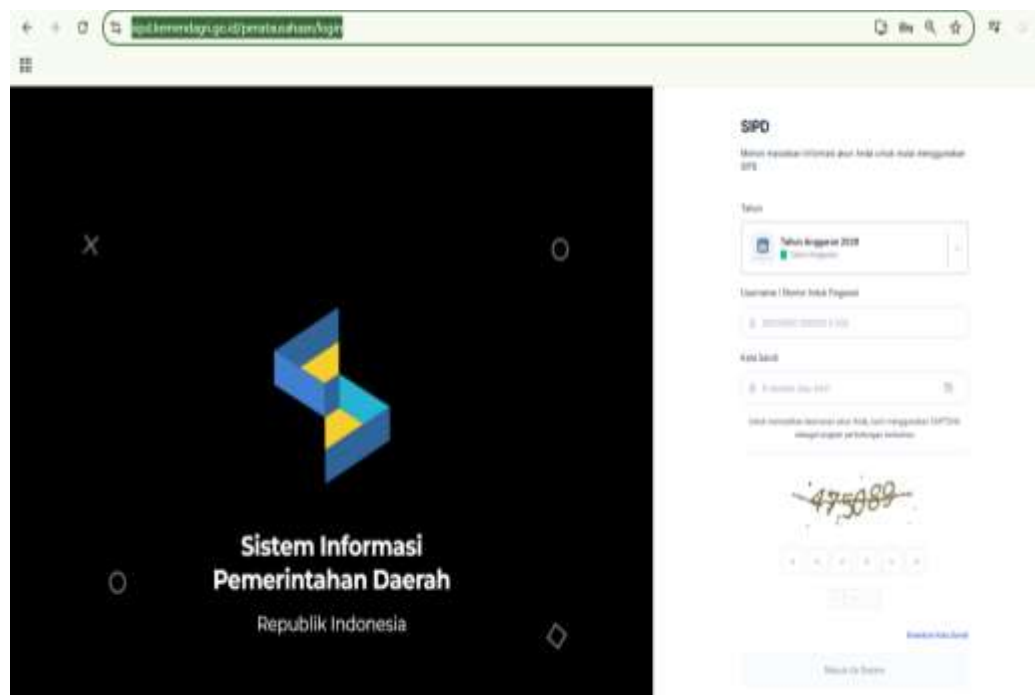
Tujuan Analisa sistem dengan menggunakan metode *System Usabilty Scale* adalah mengetahui sejauh mana pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem dengan mudah, mengetahui kecepatan dan ketepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas pada sistem, mengetahui kendala/kesalahan atau hambatan yang dialami pengguna saat menggunakan sistem, mengetahui apakah pengguna dapat dengan mudah mengingat kembali cara penggunaan sistem, dan dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Dapat disimpulkan tujuan analisa sistem dengan metode *SUS* adalah menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kualitas penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas, efisisensi, dan kepuasa pengguna terhadap sistem.

4.2.2 Gambaran Umum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim beralamat atau dengan url pada <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>. Tujuan dari dibuatnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim

adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. Berikut halaman utama dari Sistem Informasi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim :

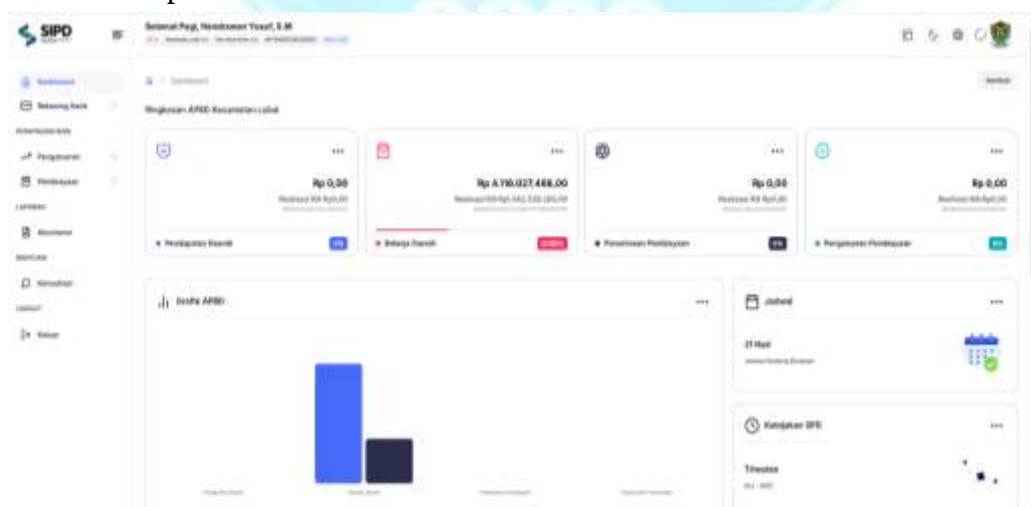
1. Tampilan Utama SIPD Kabupaten Muara Enim.



Gambar 4.1. Halaman Utama E-Kinerja Kabupaten Muara Enim

Ini merupakan tampilan depan dari SIPD Kabupaten Muara Enim sebelum pengguna login ke akun masing-masing dengan menggunakan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan password.

2. Tampilan Beranda SIPD



Gambar 4.2. Tampilan Beranda SIPD

- Dashbord berisi informasi tentang Beranda SIPD.
 - Rekening Bank berisi informasi tentang rekening SKPD pengguna.
 - Penatausahaan pengeluaran dan pembiayaan, Untuk informasi penatausahaan berupa SPP, SPM, BKU serta SPJ sedangkan untuk informasi penatausahaan pembiayaan untuk SPKD yang ada pembiayaan saja.
 - Akuntansi berupa informasi tentang laporan akuntansi berupa Laporan realisasi Anggaran.
 - Bantuan merupakan Layanan Konsultasi terhadap permasalahan yang ada pada SIPD.
 - Logout adalah menu keluar dari SIPD.
3. Tampilan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

KAB. MUARA ENIM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 16.0002.000003AL.07.01.0.00.0.00.11.0000P152026

Lampiran TPF	
SPP - LS	
1. Nama SKPD	Kecamatan Labai
2. Nama Unit SKPD	Kecamatan Labai
3. Kode dan Nama Sub Kegiatan	Teknologi
4. Nama Pengguna Anggaran	Wan Wana Putra, S. STP, M.Si
5. Nama PPK	Muhamad Bayu Raja Prima, SE
6. Nama Bendahara Pengeluaran	Hendrawan Yusuf, S.N
7. NPWP Bendahara Pengeluaran	8011075571000
8. Nama Bank	Bank Sumut Babel
9. Nomor Rekening Bank	1473010000
10. Nama & Rekening Bank	BEND. RTN KEC. LABAI
11. Untuk Kegiatan	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Maret 2026 Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Kecamatan Labai Kabupaten Muara Enim
12. Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 16.0002.000003AL.07.01.0.00.0.00.11.0000P142026 Tanggal 02 Januari 2026
	Jumlah Rp1.838.720.000,00 Terdikang (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)

Lampiran	
1. SPD	
Tanggal: 02 Januari 2026	Nomor: 16.0002.000003AL.07.01.0.00.0.00.11.0000P142026 Rp1.838.720.000,00
2. SPD Subkomponen	
Tanggal: -	Nomor: - -

Pada SPP ini terdapat lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai dasar untuk dapat ditarik ke rekening bank sesuai SPP ini.

PELAMBAT PELAKSANA TERIMA RESITAN	
Muhamad Bayu Raja Prima, SE 8000000015000000	Hendrawan Yusuf, S.N 10000000000000000000
Lampiran Asli Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3	Untuk Pengguna Anggaran/PPK SKPD Untuk Rucas DAUD Untuk Bendahara Pengeluaran Untuk Atasan Bendahara Pengeluaran

Muara Enim, 11 Mei 2026
BENDAHARA PENGESAHAN

KAB. MUARA ENIM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NOMOR 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000
TANGGAL 11 MAREK 2020

KEMUDIAN MEMERIKSA PENCUKURAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPP: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000		
2	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	7.01.01.2.02.0001 Penyelenggaraan dan Tergantung A/R		
4	8.1.01.02.000.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prinsip Kerja PPPK Sumber Dana :	Rp5.763.440,00
Jumlah			Rp5.763.440,00

Tertang, Lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Muara Enim, 11 Mar 2020
BENDAHARA PENGELUARAN

Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si
15011112001421002

Berthelina Tual, S.M
15000102001000001

Gambar 4.3 Tampilan SPP

Ini merupakan tampilan informasi detail pengajuan dana, meliputi data bendahara pengeluaran, jenis SPP (UP/GU/TU/LS), rincian sub kegiatan, nilai anggaran yang diajukan, tanggal pengajuan.

4. Tampilan SPM (Surat Perintah Membayar)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LAWANG (S. 3)

Tahun Anggaran: 2020			Nomor SPM: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000																																														
KEMUDIAN MEMERIKSA PENCUKURAN PENGGUNA ANGGARAN Status menyetor (SPM) secara Nama (SPM) : Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si Nama User SPK : Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si Nama : Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si No. Rekening Bank : 15011112001421002 Nama di Rekening Bank : Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si Nama Bank : Catung UPTD : 15011112001421002 Dasar Pengesahan : 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000			Pengajuan-Pengajuan <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>D. Giling</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPK (2)</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uraian Pengeluaran 1%</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Uraian Jaminan Pengeluaran 1%</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Uraian Jaminan Pengeluaran Kerja</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Uraian Jaminan Pengeluaran</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Uraian Pengeluaran 1%</td> <td>15011112001421002</td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Spesifikasi</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Revisi (S. 3.3)</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Denda</td> <td></td> <td>Rp5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp57.634,00</td> </tr> </tbody> </table>			No	Uraian	D. Giling	Jumlah	1	PPK (2)		Rp5,00	2	Uraian Pengeluaran 1%		Rp5,00	3	Uraian Jaminan Pengeluaran 1%		Rp5,00	4	Uraian Jaminan Pengeluaran Kerja		Rp5,00	5	Uraian Jaminan Pengeluaran		Rp5,00	6	Uraian Pengeluaran 1%	15011112001421002	Rp5,00	7	Spesifikasi		Rp5,00	8	Revisi (S. 3.3)		Rp5,00	9	Denda		Rp5,00	Jumlah			Rp57.634,00
No	Uraian	D. Giling	Jumlah																																														
1	PPK (2)		Rp5,00																																														
2	Uraian Pengeluaran 1%		Rp5,00																																														
3	Uraian Jaminan Pengeluaran 1%		Rp5,00																																														
4	Uraian Jaminan Pengeluaran Kerja		Rp5,00																																														
5	Uraian Jaminan Pengeluaran		Rp5,00																																														
6	Uraian Pengeluaran 1%	15011112001421002	Rp5,00																																														
7	Spesifikasi		Rp5,00																																														
8	Revisi (S. 3.3)		Rp5,00																																														
9	Denda		Rp5,00																																														
Jumlah			Rp57.634,00																																														
Uraian Kegiatan: Pengesahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Uraian Monev 2020 Berdasarkan Prinsip Kerja PPPK Revisi Uraian Monev 2020 Berdasarkan Prinsip <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETERANGAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMOR SPP: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.01.01.2.02.0001 - Penyelenggaraan dan Tergantung A/R</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.1.01.02.000.0000</td> <td>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prinsip Kerja PPPK</td> <td>Rp5.763.440,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp5.763.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			KETERANGAN	URAIAN	NILAI	NOMOR SPP: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 - Penyelenggaraan dan Tergantung A/R			8.1.01.02.000.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prinsip Kerja PPPK	Rp5.763.440,00	Jumlah		Rp5.763.440,00	SPM Yang Dihasilkan Jumlah Yang Ditanya (Rp57.634,00) Rp57.634,00 Jumlah Pengajuan Rp57.634,00 Jumlah Total Rp57.634,00 Jumlah Yang Dibayarkan Rp57.634,00																												
KETERANGAN	URAIAN	NILAI																																															
NOMOR SPP: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000																																																	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																																	
7.01.01.2.02.0001 - Penyelenggaraan dan Tergantung A/R																																																	
8.1.01.02.000.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prinsip Kerja PPPK	Rp5.763.440,00																																															
Jumlah		Rp5.763.440,00																																															
Uraian SPP Ditanya Rp5.763.440,00 Nomor dan Tanggal SPP: 15.0202.0000045.57.01.0.00.11.0000P140000 tanggal 11 Mar 2020			Muara Enim, 11 Mar 2020 PENGGUNA ANGGARAN Wier Wierma Putra, S. STP, M. Si 15011112001421002																																														

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

Gambar 4.4 Tampilan SPM

Ini merupakan informasi yang menampilkan daftar SPM yang sudah dibuat oleh PPK-SKPD, mencakup nomor SPM, tanggal, jenis belanja, penerima, dan nominal.

5. Tampilan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

[illegible]

Gambar 4.5 Tampilan SP2D

Ini merupakan informasi yang meliputi Meliputi nomor SP2D, jenis SP2D, Nomor dan tanggal SPM yang dirujuk (sebagai dasar penerbitan SP2D), Nama SKPD, Data Rekening SKPD, Kode Rekening Kegiatan, Jumlah Uang yang akan dicairkan beserta potongan potongan apabila ada, tanggal terbit SP2D.

6. Tampilan BKU (Buku Kas Umum)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA SKPD: 7.01.000.001.11.000 - Kecamatan Luba TAHUN ANGGARAN 2020					
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN Periode: 01 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020					
Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Awal			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
05 Januari 2020	16.0304.0000001.007.01.000.001.11.000M.10000	Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2020 Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Luba Kab. Muna Zonn terbit dari Pegawai 9 orang, dari 1 suami 8 orang, anak 10 orang jumlah 25 jiwa	Rp42.586.519,00	Rp0,00	Rp42.586.519,00
05 Januari 2020	16.0304.0000001.007.01.000.001.11.000M.10000	Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2020 Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Luba Kab. Muna Zonn terbit dari Pegawai 9 orang, dari 1 suami 8 orang, anak 10 orang jumlah 25 jiwa	Rp0,00	Rp42.586.519,00	Rp0,00
05 Januari 2020	16.0304.0000001.007.01.000.001.11.000M.10000	Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2020 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kecamatan Luba Kab. Muna Zonn terbit dari Pegawai 14 orang, dari 1 suami 10 orang, anak 10 orang jumlah 43 jiwa	Rp45.598.488,00	Rp0,00	Rp45.598.488,00
05 Januari 2020	16.0304.0000001.007.01.000.001.11.000M.10000	Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2020 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kecamatan Luba Kab. Muna Zonn terbit dari Pegawai 14 orang, dari 1 suami 10 orang, anak 10 orang jumlah 43 jiwa	Rp0,00	Rp45.598.488,00	Rp0,00
20 Januari 2020	16.0304.0000001.007.01.000.001.11.000M.10000	PENYALINAN UMUM PERSEDIAAN (UP) PADA KECAMATAN LUBA KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
Total			Rp188.184.000,00	Rp87.584.000,00	Rp100.600.000,00
Saldo Kas @ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu/Bendahara UOK Rp100.000.000,00 (Berbagai Jenis UOK)					
1. Saldo TL Rp0,00 2. Saldo UP Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: a. Tunai Rp0,00 b. Bank Rp100.000.000,00 3. Saldo SU KUPD Rp0,00					
Dibuatkan Oleh PENGASAH ANGGARAN			Dibuatkan Oleh BENDAHARA PENGELUARAN		
Wan Wima Patta, S. STP., M.B. 196111100120021002			Herdawan Yusuf, S.M. 1960100202002001001		

Gambar 4.6 Tampilan BKU

Ini merupakan informasi yang berisi catatan harian transaksi keuangan meliputi tanggal transaksi, nomor bukti pengeluaran (pencairan), uraian kegiatan, jumlah pengeluaran, jumlah saldo kas akhir

7. Tampilan Laporan

 PEMERINTAHAN KABUPATEN MUARA ENIM KECAMATAN LUBAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Januari 2025 					
Kode Belanja	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
0	BELANJA DAERAH	4.136.827.460,00	87.093.066,00	2,13	0,00
0.1	BELANJA OPERASI	3.996.827.460,00	87.093.066,00	2,26	0,00
0.1.01	Belanja Pegawai	2.294.230.960,00	87.093.066,00	3,80	0,00
0.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.788.434.770,00	87.093.066,00	5,15	0,00
0.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	1.261.267.780,00	89.073.360,00	7,13	0,00
0.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	598.363.480,00	6.278.576,00	1,10	0,00
0.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Istri/an ASN	33.862.000,00	2.338.000,00	6,90	0,00
0.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Pensiun/an ASN	1.162.230,00	388.000,00	33,44	0,00
0.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Pensiun/Umat ASN	27.918.000,00	1.332.000,00	5,04	0,00
0.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Rawat ASN	883.635.124,00	4.787.368,00	0,54	0,00
0.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khasa ASN	8.162.000,00	75.204,00	0,92	0,00
0.1.01.01.008	Belanja Pendidikan Gaji ASN	40.000,00	1.030,00	2,57	0,00
0.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	893.824.290,00	0,00	0,00	0,00
0.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Rata-Rata Gaji ASN	893.824.290,00	0,00	0,00	0,00
0.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Rata-Rata Gaji ASN	37.311.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02	Belanja Sewa dan Gaji	1.471.768.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.01	Belanja Sewa	768.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.01.001	Belanja Sewa Peralatan	768.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02	Belanja Jasa	293.798.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	122.498.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02.002	Belanja Jasa Lainnya (Konsultan)	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02.003	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Transportasi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.02.007	Belanja Sewa Perabotan, Perlengkapan, Perlengkapan Teknis serta Perlengkapan dan Perbaikan	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	188.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan	188.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Perbaikan	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Perbaikan	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.005	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.007	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.008	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.009	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.010	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.011	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.012	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.013	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.014	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.015	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.016	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.017	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.018	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.019	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.020	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.021	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.022	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.023	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.024	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.025	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.026	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.027	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.028	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.029	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.030	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.031	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.032	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.033	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.034	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.035	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.036	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.037	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.038	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.039	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.040	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.041	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.042	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.043	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.044	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.045	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.046	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.047	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.048	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.049	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.050	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.051	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.052	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.053	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.054	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.055	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.056	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.057	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.058	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.059	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.060	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.061	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.062	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.063	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.064	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.065	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.066	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.067	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.068	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.069	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.070	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.071	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.072	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.073	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.074	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.075	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.076	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.077	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.078	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.079	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.080	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.081	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.082	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.083	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.084	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.085	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.086	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.087	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.088	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.089	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.090	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.091	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.092	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.093	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.094	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.095	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.096	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.097	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.098	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.099	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.03.100	Belanja Pemeliharaan Perbaikan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Gambar 4.7 Tampilan Laporan

Ini merupakan informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam penatausahaan keuangan pemerintah menyajikan informasi perbandingan antara anggaran (rencana) dan realisasi (pelaksanaan) pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

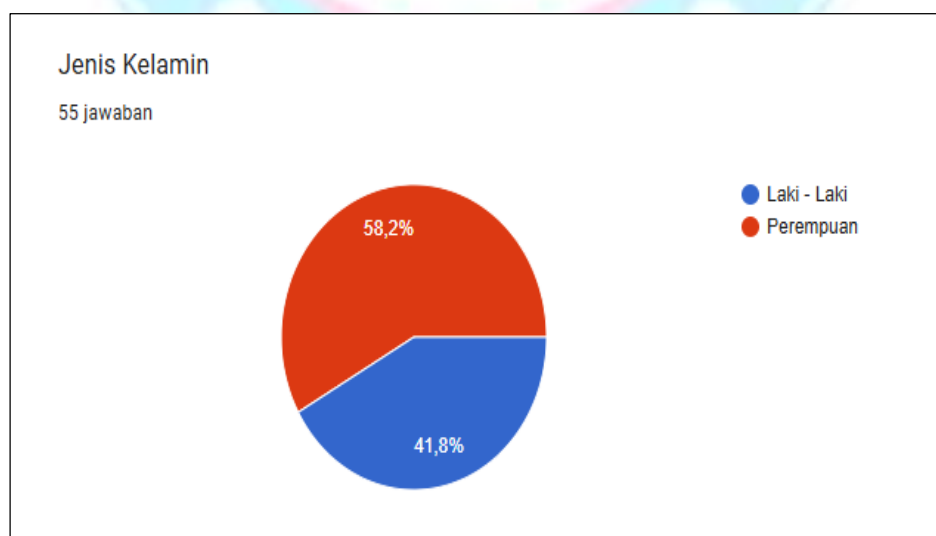
4.3 Observasi

Hasil dari observasi *user interface (UI)* peneliti terhadap pengguna sistem informasi SIPD mengeluhkan pada tampilan SPM (Surat Perintah Membayar) dari data rekening SKPD serta NPWP hanya ada tulisan terlampir yang mengakibatkan data tersebut harus dilakukan secara manual. Pengguna kebingungan mengapa data dari SPP tidak terintegrasi dengan SPM yang telah di verifikasi yang menyebabkan SPM harus di manualkan yang mengakibatkan ketidak efektifan dan ketidak efisien pada penggunaan sistem.

4.3.1 Deskripsi Objek Penelitian.

Pada Bab Sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek penelitian ini adalah SIPD Kabupaten Muara Enim, Pengumpulan data didapatkan dari kuesioner berupa Google Form yang telah di isi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyebarkan melalui aplikasi whatsApp. Tujuan penyebaran kuesioner menggunakan google form agar data tersimpan melalui media digital sehingga data dapat diakses kembali dengan mudah.

Setelah penyebaran kuesioner, peneliti melakukan pengolahan data untuk persiapan analisis. Berdasarkan hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa responden sebanyak 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengisi 10 pernyataan untuk dianalisis. Pada tahap ini peneliti memberikan kuesioner kepada responden secara online melalui google form. Diketahui bahwa dari 10 pernyataan didominasi oleh perempuan (58,2%) dan laki-laki (41,8%).



Gambar 4.8 Chart Jenis Kelamin Responden

Dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden diketahui 55 responden telah menjawab dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 responden atau 41,8% dan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 32 responden atau 58,2%. Data yang sudah terkumpul kemudian dihitung menggunakan cara yang dapat dilihat pada Bab 3.

4.3.2 Distribusi Jawaban Responden

Hasil pengolahan data dari variabel-variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Variabel SUS

Pernyataan	Pilihan Jawaban				
	STS	TS	N	S	SS
	%	%	%	%	%
Saya berpikir akan menggunakan <i>website</i> ini lagi (<i>satisfaction</i>)	0%	0%	0%	52,7%	47,3%
Saya merasa <i>website</i> ini rumit untuk digunakan (<i>learnability</i>)	7,3%	49,1%	32,7%	9,1%	1,8%
Saya merasa <i>website</i> ini mudah diingat atau digunakan (<i>memorability</i>)	0%	0%	0%	54,5,0%	45,5%
Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan <i>website</i> ini (<i>learnability</i>)	1,8%	41,8%	25,5%	27,3%	3,6%
Saya merasa fitur-fitur <i>website</i> ini sudah berjalan dengan semestinya (<i>satisfaction</i>)	0%	0%	3,6%	50,9%	45,5%
Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada <i>website</i> ini (<i>errors</i>)	1,8%	36,4%	36,4%	21,8%	3,6%
Saya merasa orang lain akan memahami cara	0%	0%	0%	56,4%	43,6%

menggunakan <i>website</i> ini dengan cepat (<i>learnability</i>)					
Saya merasa <i>website</i> ini membingungkan (<i>learnability</i>)	5,5%	56,4%	23,6%	12,7%	1,8%
Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan <i>website</i> ini (<i>efficiency</i>)	5,5%	94,5%	0%	0%	0%
Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan <i>website</i> ini (<i>learnability</i>)	1,8%	10,9%	23,6%	58,2%	5,5%

Dari Tabel 4.1 diatas, berdasarkan data yang telah diolah untuk pernyataan 1 sampai dengan 10 rata rata pengguna memberikan jawaban bahwa kinerja sistem sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk pernyataan 9 yang menyatakan bawah 94,5% pengguna menyatakan tidak setuju apabila tidak ada hambatan pada sistem.



BAB V

IMPLEMENTASI

5.1 Uji Validitas

Dikarenakan peneliti memilih nilai yang mendekati jumlah responden, pada tahap pengujian validitas, nilai r tabel yang dicapai pada saat ini adalah 0,266. Nilai r tabel tersebut digunakan pada tingkat signifikansi 5%, dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Apabila nilai r-hitung melebihi nilai r-tabel sebesar 0,266 maka item tersebut dianggap valid; sedangkan jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka item tersebut dianggap tidak valid. Rincian dapat dilihat pada tabel r berikut ini:

Tabel 5.1. Tabel Distribusi Nilai rtabel signifikansi 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210

28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS for windows versi 23 maka didapatkan hasil seperti pada gambar dibawah ini :

Correlations												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.054	.891**	-.083	.526**	-.007	.709**	-.076	-.093	.168	.437**
	Sig. (2-tailed)		.693	.000	.546	.000	.961	.000	.584	.498	.220	.001
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P2	Pearson Correlation	.054	1	.032	.532**	-.011	.691**	.010	.665**	-.438**	.273*	.730**
	Sig. (2-tailed)	.693		.816	.000	.934	.000	.944	.000	.001	.044	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P3	Pearson Correlation	.891**	.032	1	-.126	.555**	-.052	.669**	-.184	-.102	.060	.359**
	Sig. (2-tailed)	.000	.816		.359	.000	.704	.000	.180	.457	.662	.007
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P4	Pearson Correlation	-.083	.532**	-.126	1	.086	.570**	-.015	.541**	-.281*	.378**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.546	.000	.359		.534	.000	.915	.000	.038	.004	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P5	Pearson Correlation	.526**	-.011	.555**	.086	1	-.127	.324*	-.087	-.249	.213	.345**
	Sig. (2-tailed)	.000	.934	.000	.534		.355	.016	.527	.067	.118	.010
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P6	Pearson Correlation	-.007	.691**	-.052	.570**	-.127	1	-.098	.721**	-.210	.180	.699**
	Sig. (2-tailed)	.961	.000	.704	.000	.355		.475	.000	.124	.188	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P7	Pearson Correlation	.709**	.010	.669**	-.015	.324*	-.098	1	-.077	-.112	.351**	.401**
	Sig. (2-tailed)	.000	.944	.000	.915	.016	.475		.577	.418	.009	.002
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P8	Pearson Correlation	-.076	.665**	-.184	.541**	-.087	.721**	-.077	1	-.238	.317*	.694**
	Sig. (2-tailed)	.584	.000	.180	.000	.527	.000	.577		.080	.018	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P9	Pearson Correlation	-.093	-.438**	-.102	-.281*	-.249	-.210	-.112	-.238	1	-.326*	-.369**
	Sig. (2-tailed)	.498	.001	.457	.038	.067	.124	.418	.080		.015	.006
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P10	Pearson Correlation	.168	.273*	.060	.378**	.213	.180	.351**	.317*	-.326*	1	.593**
	Sig. (2-tailed)	.220	.044	.662	.004	.118	.188	.009	.018	.015		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.437**	.730**	.359**	.692**	.345**	.699**	.401**	.694**	-.369**	.593**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.007	.000	.010	.000	.002	.000	.006	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 5.1 Output Correlation Uji Validitas SPSS

Berdasarkan perhitungan Pengujian validitas pada 10 pertanyaan kuesioner yang telah dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for windows versi 23* dengan kriteria :

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Pertanyaan 1 : $r \text{ hitung } 0.437 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- b. Pertanyaan 2 : $r \text{ hitung } 0.730 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- c. Pertanyaan 3 : $r \text{ hitung } 0.359 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- d. Pertanyaan 4 : $r \text{ hitung } 0.692 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- e. Pertanyaan 5 : $r \text{ hitung } 0.345 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- f. Pertanyaan 6 : $r \text{ hitung } 0.699 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- g. Pertanyaan 7 : $r \text{ hitung } 0.401 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- h. Pertanyaan 8 : $r \text{ hitung } 0.694 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- i. Pertanyaan 9 : $r \text{ hitung } 0.369 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$
- j. Pertanyaan 10 : $r \text{ hitung } 0.593 > r \text{ tabel } 0.266 = \text{VALID}$

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, maka didapatkan rata-rata yaitu 0.5319 maka $r \text{-hitung } (0,5319) > r \text{-tabel } (0.266)$ sehingga semua butir item dinyatakan valid dan layak untuk pengumpulan data penelitian.

5.2 Uji Realibilitas

Setelah butir-butir instrumen diuji validasi maka selanjutnya dilakukan uji tingkat kehandalan, Variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,5$ maka reliabel
- b. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,5$ maka tidak reliabel

Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ dari 0,5.

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan *SPSS for windows versi 23* maka didapatkan hasil seperti pada gambar dibawah ini :

→ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
	N	%
Cases Valid	55	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.707	10

Gambar 5.2. Output Uji Realibilitas SPSS

Kuesioner dikatakan reliabel jika Cronbrach Alpha > 0.5 . Berdasarkan hasil uji reabilitas diatas didapatkan nilai Cronbach's Alpha 0,707 yang berarti $> 0,5$ sehingga semua instrumen tersebut dikatakan reliable dan konsisten sebagai alat pengumpul data penelitian.

5.3 Pembahasan Hasil Kuisioner

Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliabel, pada tahapan ini penulis akan membahas rekapitulasi data kuesioner yang telah didapatkan. Adapun hasil dari jawaban kuisioner yang sudah disebar penulis dari responden dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2. Tabel Hasil Jawaban Kuisioner Responden

Responden	Hasil Jawaban Kuisioner									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	5	2	5	3	5	2	5	3	2	3
2	5	2	5	4	5	4	5	2	2	4
3	5	2	5	2	5	2	5	2	2	4
4	5	2	5	4	4	3	5	2	2	4
5	5	2	4	2	5	2	4	2	2	4

6	5	3	4	4	4	4	5	4	2	4
7	5	2	5	2	5	2	5	2	2	4
8	5	3	5	2	5	3	5	2	2	4
9	5	2	5	2	4	3	5	2	2	4
10	4	2	5	2	5	2	4	1	2	2
11	5	2	5	4	5	2	5	2	2	4
12	4	3	4	3	5	3	4	3	1	4
13	5	4	5	4	5	3	4	3	2	4
14	5	2	5	2	5	3	4	2	2	3
15	5	4	5	5	5	4	5	4	2	4
16	4	3	4	3	4	3	4	2	2	3
17	5	3	5	2	4	4	5	3	2	3
18	5	4	5	4	5	4	5	4	2	4
19	5	2	5	2	5	2	5	2	2	4
20	4	3	4	3	4	3	4	3	2	3
21	4	2	4	3	4	2	4	2	2	2
22	4	2	4	3	4	3	4	2	2	4
23	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4
24	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4
25	4	3	4	2	4	3	4	2	2	2
26	5	1	5	2	5	2	5	2	2	5
27	4	2	4	2	4	2	5	2	2	4
28	4	3	4	4	5	3	4	2	2	4
29	4	3	4	3	4	3	4	3	2	3
30	4	2	4	2	3	2	4	2	2	3
31	5	1	5	2	5	3	4	1	2	1
32	5	5	5	4	5	5	5	5	1	5
33	4	2	4	2	4	2	5	2	2	4
34	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4
35	4	3	4	3	4	3	4	3	2	3
36	5	3	5	2	4	3	4	3	2	3

37	4	2	4	3	4	3	4	2	2	4
38	4	3	4	3	3	3	4	3	2	4
39	4	2	4	4	5	3	4	2	2	4
40	5	1	5	1	5	1	5	1	2	3
41	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4
42	5	4	5	2	4	4	5	2	2	4
43	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4
44	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2
45	4	3	4	3	4	5	4	4	2	3
46	4	3	4	4	5	4	4	4	2	4
47	4	2	4	3	5	2	4	3	2	4
48	5	4	5	5	5	3	5	2	1	5
49	5	2	5	3	4	3	5	2	2	2
50	5	2	5	2	5	2	5	2	2	3
51	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2
52	5	2	5	2	5	2	5	2	2	4
53	4	3	4	4	4	4	4	3	2	3
54	4	1	4	2	4	2	4	2	2	4
55	4	2	4	4	4	2	5	2	2	4

Pada tabel tersebut terlihat untuk kolom responden yang menyatakan urutan responden yang mengisi kuisioner yang telah disebar dari nomor urut 1 sampai dengan 55 artinya disana terdapat 55 responden yang telah mengisi kuisioner tersebut, sedangkan untuk jawaban hasil kuisioner terdapat hasil jawaban dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan nomor 10.

Setelah melihat hasil jawaban kuisioner dari responden pada tabel 5.2 penulis dapat menghitung jawaban berdasarkan lima jawaban pilihan ganda yaitu sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, netral (N) dengan nilai 3, setuju (S) dengan nilai 4, dan sangat setuju (SS) dengan nilai 5 yang hasilnya akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel. 5.3. Tabel Rekapitulasi Hasil Responden

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total
1	Saya Berpikir Akan Menggunakan Website (SIPD) ini Lagi	0	0	0	29	26	55
2	Saya Merasa Website (SIPD) Ini Rumit Untuk Digunakan	4	27	18	5	1	55
3	Saya Merasa Website (SIPD) Ini Mudah Digunakan	0	0	0	30	25	55
4	Saya Membutuhkan Bantuan Dari Orang Lain Atau Teknisi Dalam Menggunakan Website (SIPD) Ini	1	23	14	15	2	55
5	Saya Merasa Fitur - Fitur Website (SIPD) Ini Sudah Berjalan Dengan Semestinya	0	0	2	28	25	55
6	Saya Merasa Ada Banyak Hal Yang Tidak Konsisten	1	20	20	12	2	55

	Pada Website (SIPD) Ini						
7	Saya Merasa Orang Lain Akan Memahami Cara Menggunakan Website (SIPD) Ini Dengan Cepat	0	0	0	31	24	55
8	Saya Merasa Website (SIPD) Ini Membingungkan	3	31	13	7	1	55
9	Saya Merasa Tidak Ada Hambatan Dalam Menggunakan Website (SIPD) Ini	3	52	0	0	0	55
10	Saya Perlu Membiasakan Diri Terlebih Dahulu Sebelum Menggunakan Website (SIPD) Ini	1	6	13	32	3	55
Total		13	159	80	189	109	550
Proporsi		2.4%	28.9%	14.5%	34.4%	19.8%	100%

Pada tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 2.4% responden memilih sangat tidak setuju, 28.9% responden memilih tidak setuju, 14.5% responden memilih ragu-ragu (netral), 34.4% responden memilih setuju, dan 19.8.6% responden memilih sangat sangat setuju.

Dari data responden yang didapat harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Pada Jawaban sangat setuju dengan bobot 5 dan paling negatif adalah sangat tidak setuju dengan bobot 1. Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pertanyaan pertama (P1):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $0 \times 1 = 0$
- b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $0 \times 2 = 0$
- c. (N) Jawaban netral (3) = $0 \times 3 = 0$
- d. (S) Jawaban setuju (4) = $29 \times 4 = 116$
- e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $26 \times 5 = 130$

Total Skor: $0 + 0 + 0 + 116 + 130 = 246$

Pertanyaan kedua (P2):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $4 \times 1 = 4$
- b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $27 \times 2 = 54$
- c. (N) Jawaban netral (3) = $18 \times 3 = 54$
- d. (S) Jawaban setuju (4) = $5 \times 4 = 20$
- e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $1 \times 5 = 5$

Total Skor: $4 + 54 + 54 + 20 + 5 = 137$

Pertanyaan ketiga (P3):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $0 \times 1 = 0$
- b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $0 \times 2 = 0$
- c. (N) Jawaban netral (3) = $0 \times 3 = 0$
- d. (S) Jawaban setuju (4) = $30 \times 4 = 120$
- e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $25 \times 5 = 125$

Total Skor: $0 + 0 + 0 + 120 + 125 = 245$

Pertanyaan keempat (P4):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $1 \times 1 = 1$
- b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $23 \times 2 = 46$
- c. (N) Jawaban netral (3) = $14 \times 3 = 42$
- d. (S) Jawaban setuju (4) = $15 \times 4 = 60$
- e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $2 \times 5 = 10$

Total Skor: $1 + 46 + 42 + 60 + 10 = 159$

Pertanyaan kelima (P5):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $0 \times 1 = 0$
 - b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $0 \times 2 = 0$
 - c. (N) Jawaban netral (3) = $2 \times 3 = 6$
 - d. (S) Jawaban setuju (4) = $28 \times 4 = 112$
 - e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $25 \times 5 = 125$
- Total Skor: $0 + 0 + 6 + 112 + 125 = 243$

Pertanyaan keenam (P6):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $1 \times 1 = 1$
 - b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $20 \times 2 = 40$
 - c. (N) Jawaban netral (3) = $20 \times 3 = 60$
 - d. (S) Jawaban setuju (4) = $12 \times 4 = 48$
 - e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $2 \times 5 = 10$
- Total Skor: $1 + 40 + 60 + 48 + 10 = 159$

Pertanyaan ketujuh (P7):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $0 \times 1 = 0$
 - b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $0 \times 2 = 0$
 - c. (N) Jawaban netral (3) = $0 \times 3 = 0$
 - d. (S) Jawaban setuju (4) = $31 \times 4 = 124$
 - e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $24 \times 5 = 120$
- Total Skor: $0 + 0 + 0 + 124 + 120 = 244$

Pertanyaan kedelapan (P8):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $3 \times 1 = 3$
 - b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $31 \times 2 = 62$
 - c. (N) Jawaban netral (3) = $13 \times 3 = 39$
 - d. (S) Jawaban setuju (4) = $7 \times 4 = 28$
 - e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $1 \times 5 = 5$
- Total Skor: $3 + 62 + 39 + 28 + 5 = 137$

Pertanyaan kesembilan (P9):

- a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $3 \times 1 = 3$
- b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $52 \times 2 = 104$
- c. (N) Jawaban netral (3) = $0 \times 3 = 0$

d. (S) Jawaban setuju (4) = $0 \times 4 = 0$

e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $0 \times 5 = 0$

Total Skor: $220 + 204 + 12 + 0 + 0 = 107$

Pertanyaan kesepuluh (P10):

a. (STS) Jawaban sangat tidak setuju (1) = $1 \times 1 = 1$

b. (TS) Jawaban tidak setuju (2) = $6 \times 2 = 12$

c. (N) Jawaban netral (3) = $13 \times 3 = 39$

d. (S) Jawaban setuju (4) = $32 \times 4 = 128$

e. (SS) Jawaban sangat setuju (5) = $3 \times 5 = 15$

Total Skor: $1 + 12 + 39 + 128 + 15 = 195$

5.4 Pembahasan Perhitungan *System Usability Scale (SUS)* Score

Pada tahap ini, hasil responden sebanyak 55 ASN yang telah mengisi kuesioner melalui *google form* didapatkan *score system usability scale (SUS)* masing- masing responden dan keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Hasil Skor SUS Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Respo nden	Skor Hasil Hitung Kuesioner										Tot	Nilai (Jumlah x 2.5)
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		
1	4	3	4	2	4	3	4	2	1	2	29	72,5
2	4	3	4	1	4	1	4	3	1	1	26	65
3	4	3	4	3	4	3	4	3	1	1	30	75
4	4	3	4	1	3	2	4	3	1	1	26	65
5	4	3	3	3	4	3	3	3	1	1	28	70
6	4	2	3	1	3	1	4	1	1	1	21	52,5
7	4	3	4	3	4	3	4	3	1	1	30	75
8	4	2	4	3	4	2	4	3	1	1	28	70
9	4	3	4	3	3	2	4	3	1	1	28	70
10	3	3	4	3	4	3	3	4	1	3	31	77,5
11	4	3	4	1	4	3	4	3	1	1	28	70
12	3	2	3	2	4	2	3	2	0	1	22	55
13	4	1	4	1	4	2	3	2	1	1	23	57,5
14	4	3	4	3	4	2	3	3	1	2	29	72,5
15	4	1	4	0	4	1	4	1	1	1	21	52,5
16	3	2	3	2	3	2	3	3	1	2	24	60
17	4	2	4	3	3	1	4	2	1	2	26	65
18	4	1	4	1	4	1	4	1	1	1	22	55
19	4	3	4	3	4	3	4	3	1	1	30	75
20	3	2	3	2	3	2	3	2	1	2	23	57,5

21	3	3	3	2	3	3	3	3	1	3	27	67,5
22	3	3	3	2	3	2	3	3	1	1	24	60
23	3	2	3	2	3	1	3	1	1	1	20	50
24	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	26	65
25	3	2	3	3	3	2	3	3	1	3	26	65
26	4	4	4	3	4	3	4	3	1	0	30	75
27	3	3	3	3	3	3	4	3	1	1	27	67,5
28	3	2	3	1	4	2	3	3	1	1	23	57,5
29	3	2	3	2	3	2	3	2	1	2	23	57,5
30	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	26	65
31	4	4	4	3	4	2	3	4	1	4	33	82,5
32	4	0	4	1	4	0	4	0	0	0	17	42,5
33	3	3	3	3	3	3	4	3	1	1	27	67,5
34	3	2	3	1	3	1	3	2	1	1	20	50
35	3	2	3	2	3	2	3	2	1	2	23	57,5
36	4	2	4	3	3	2	3	2	1	2	26	65
37	3	3	3	2	3	2	3	3	1	1	24	60
38	3	2	3	2	2	2	3	2	1	1	21	52,5
39	3	3	3	1	4	2	3	3	1	1	24	60
40	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	35	87,5
41	3	2	3	1	3	1	3	2	1	1	20	50
42	4	1	4	3	3	1	4	3	1	1	25	62,5
43	3	3	3	1	3	1	3	1	1	1	20	50
44	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	28	70
45	3	2	3	2	3	0	3	1	1	2	20	50
46	3	2	3	1	4	1	3	1	1	1	20	50
47	3	3	3	2	4	3	3	2	1	1	25	62,5
48	4	1	4	0	4	2	4	3	0	0	22	55
49	4	3	4	2	3	2	4	3	1	3	29	72,5
50	4	3	4	3	4	3	4	3	1	2	31	77,5
51	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	28	70
52	4	3	4	3	4	3	4	3	1	1	30	75
53	3	2	3	1	3	1	3	2	1	2	21	52,5
54	3	4	3	3	3	3	3	3	1	1	27	67,5
55	3	3	3	1	3	3	4	3	1	1	25	62,5
Total	191	138	190	116	188	116	189	138	52	80	1398	3495

Hasil total : 1398

Hasil skor seluruh responden : 3495

Rata – rata (skor SUS): 63,55

Untuk mendapatkan nilai rata-rata skor System Usability Scale (SUS) dari tabel diatas menggunakan rumus SUS sebagai berikut:

1. Setiap pertanyaan yang bernomor ganjil maka poin *SUS* nya dikurangi 1.
2. Setiap pertanyaan yang bernomor genap, dihitung dengan cara 5 dikurangi poin *SUS* yang diperoleh.
3. Skor akhir dari penjumlahan setiap pertanyaan akan dikalikan dengan 2.5 .

Sebagai contoh pernyataan nomor 1 jumlah nilai *SUS* score pada responden pertama yaitu 29, hal tersebut didapatkan dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Skor SUS} &= ((P1 - 1) + (5 - P2) + (P3 - 1) + (5 - P4) + (P5 - 1) + (5 - P6) + \\ &\quad (P7 - 1) + (5 - P8) + (P9 - 1) + (5 - P10)) \\ X &= ((5 - 1) + (5 - 2) + (5 - 1) + (5 - 3) + (5 - 1) + (5 - 2) + (5 - 1) \\ &\quad + (5 - 3) + (2 - 1) + (5 - 3)) \\ X &= (4) + (3) + (4) + (2) + (4) + (3) + (4) + (2) + (1) + (2) \\ X &= 29\end{aligned}$$

Untuk nilai P1 sampai dengan P10 dapat dilihat dari tabel 5.2 tabel hasil jawaban kuisioner responden. Kemudian hasil seluruh jumlah responden yang didapat dijumlahkan lalu dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor *SUS*. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan rumus yang telah dibahas pada Bab sebelumnya yaitu:

$$\sum X = 1398 \times 2,5$$

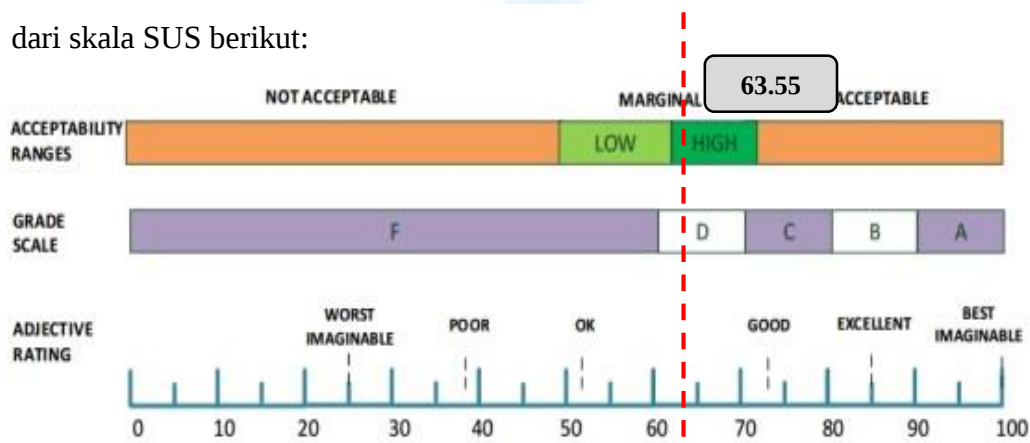
$$\sum X = 3495$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{x} = 3495 / 55$$

$$\bar{x} = 63,55$$

Dari perthitungan tersebut baru dilihat standar nilai *System Usability Scale* (*SUS*) dari skala *SUS* berikut:



Gambar 5.3 Perhitungan *System Usability Scale* Score

Dari skor *System Usability Scale (SUS)* tersebut didapatkan skor rata-rata sebesar 63.55 dimana hasilnya nilai skor rata-rata SIPD tersebut berada pada peringkat grades D dengan adjective ratings “*Good*”. Selanjutnya untuk acceptability ranges masuk ke dalam kategori “*Marginal*” atau cukup diterima dalam hal kesesuaian atau kelayakan penggunaan. Setelah peneliti melakukan perhitungan kuesioner dengan metode perhitungan skor *System Usability Scale (SUS)* didapatkanlah hasil rata-rata sebesar 63.55 dimana hasil dari perhitungan ini sudah cukup baik tapi masih terdapat kendala ataupun hambatan yang terjadi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim.

5.5 Wawancara

Untuk meneliti lebih lanjut tentang evaluasi *user interface* peneliti melakukan wawancara kepada pengguna SIPD, wawancara ini dilakukan kepada 5 pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim . Hasil wawancara ini berupa lembar pertanyaan dan jawaban yang didapat dari skor hasil *SUS* pada pertanyaan nomor 9 “Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan *website* (SIPD) ini yang mendapat skor terkecil = 52”, kemudian ditulis kembali dalam bentuk transkrip wawancara untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang ada.

Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan:

Tabel 5.5. Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Pengguna

No	Tujuan	Hasil
1	Mengetahui tujuan pengguna SIPD	Tujuan pengguna menggunakan SIPD adalah pengguna dapat menginput, mengelola dan menyimpan data secara terpusat, meningkatkan akurasi data, mempermudah penyusunan laporan keuangan,
2	Mengetahui kebutuhan dan cara pengguna	Pengguna membutuhkan SIPD ketika mereka memerlukan hasil laporan keuangan di akhir bulan. Pengguna bisa mencari hasil

	mendapatkan informasi di SIPD	kegiatan mereka dengan mengeksplorasi menu-menu yang ada pada SIPD
3	Mengetahui masalah umum yang dihadapi pengguna dalam keseharian pengguna	Permasalahan yang sering dialami pengguna adalah pada menu SPM (Surat Perintah Membayar) masih ada data yang belum tampil yaitu data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP terdapat keterangan terlampir sehingga pengguna harus membuat manual SPM (Surat Perintah Membayar) yang mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan
4	Mengetahui pendapat pengguna mengenai desain pada SIPD	Keseluruhan tampilan sistem informasi SIPD dari segi warna sudah cukup baik, menarik dan tidak membuat mata terasa tidak nyaman. <i>Icon</i> yang digunakan sudah cukup mudah untuk dipahami. Tampilan data kadang terlalu padat membuat pengguna merasa kurang nyaman ketika membaca data dalam jumlah banyak

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari wawancara kepada pengguna / *user* maka pokok permasalahan dari SIPD Kabupaten Muara Enim ini hanya terdapat permasalahan pada Pertanyaan 3 : “Masih adanya kendala pada tampilan SPM (Surat Perintah Membayar) terdapat tidak munculnya data pada tampilan SPM tersebut, sehingga memerlukan pengguna membuat SPM (Surat Perintah Membayar) secara manual yang mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan”. Oleh sebab itu peneliti bermaksud membuat rekomendasi *user interface* / tampilan dari permasalahan tersebut dengan menampilkan data yang tidak muncul pada SPM (Surat Perintah Membayar).

PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026			Nomor SPM: 16.03/03.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.11.0000/M/12/2026																																													
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Lubai Nama Unit SKPD : Kecamatan Lubai Nama : Terlampir No. Rekening Bank : Terlampir Nama di Rekening Bank : Terlampir Nama Bank - Cabang : Terlampir NPWP : Terlampir Dasar Pembayaran : 16.03/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.11.0000/M/12/2026 Untuk Keperluan: Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2026, Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim terdiri dari Pegawai 9 orang, istri / suami 6 orang, anak 10 orang jumlah 25 jiwa Pembebanan Pada:			Potongan-Potongan:																																													
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PPH 21</td> <td>041588047728709</td> <td>Rp79.354,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Iuran Wajib Pegawai 8%</td> <td>702512304166675</td> <td>Rp2.902.500,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Iuran Jaminan Kesehatan 4%</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Iuran Jaminan Kematian</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Iuran Wajib Pegawai 1%</td> <td>702512304166603</td> <td>Rp402.064,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Taparum</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Beras (BULOG)</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Zakat</td> <td></td> <td>Rp0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp3.383.918,00</td> </tr> </table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	041588047728709	Rp79.354,00	2	Iuran Wajib Pegawai 8%	702512304166675	Rp2.902.500,00	3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	6	Iuran Wajib Pegawai 1%	702512304166603	Rp402.064,00	7	Taparum		Rp0,00	8	Beras (BULOG)		Rp0,00	9	Zakat		Rp0,00	Jumlah			Rp3.383.918,00
			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																										
			1	PPH 21	041588047728709	Rp79.354,00																																										
			2	Iuran Wajib Pegawai 8%	702512304166675	Rp2.902.500,00																																										
			3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00																																										
			4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00																																										
			5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00																																										
			6	Iuran Wajib Pegawai 1%	702512304166603	Rp402.064,00																																										
			7	Taparum		Rp0,00																																										
8	Beras (BULOG)		Rp0,00																																													
9	Zakat		Rp0,00																																													
Jumlah			Rp3.383.918,00																																													
SPM Yang Dibayarkan																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp42.096.518,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp3.383.918,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp38.712.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp42.096.518,00</td> </tr> </table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp42.096.518,00	Jumlah Potongan	Rp3.383.918,00	Jumlah Netto	Rp38.712.600,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp42.096.518,00																																							
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp42.096.518,00																																															
Jumlah Potongan	Rp3.383.918,00																																															
Jumlah Netto	Rp38.712.600,00																																															
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp42.096.518,00																																															
Uang Sejumlah: (Empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah)																																																
Muara Enim, 02 Januari 2026 PENGGUNA ANGGARAN Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si 198111112001121002																																																
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																																
Jumlah SPP Diminta Rp42.096.518,00																																																
Nomor dan Tanggal SPP : 16.03/02.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.11.0000/M/12/2026, tanggal 02 Januari 2026																																																

Gambar 5.4 Tampilan Awal SPM (Surat Perintah Membayar)

Pada tampilan awal di SPM (Surat Perintah Membayar) data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP terdapat keterangan terlampir atau tidak terdapat datanya. Setelah dilakukan wawancara langsung terhadap *user* maka direkomendasikan lah untuk ditampilkan data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP tersebut pada tampilan SPM.

PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (L 3)																																																	
Tahun Anggaran: 2026	Nomor SPM: 16.03/03.0/000001/L 5/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026																																																
KUA SA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Lubal Nama Unit SKPD : Kecamatan Lubal Nama : Hendrawan Yusuf, S.M / Bendahara Pengeluaran No. Rekening Bank : 1473010333 Nama di Rekening Bank : Kecamatan Lubal Nama Bank - Cabang : Bank Sumsel Babel NPWP : 00116075513000 Dasar Pembayaran : 16.03/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td></td><td>Rp79.354,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Iuran Wajib Pegawai 8%</td><td></td><td>Rp2.902.500,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Iuran Jaminan Kesehatan 4%</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Iuran Jaminan Kematian</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>Iuran Wajib Pegawai 1%</td><td></td><td>Rp402.064,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Taparum</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>Beras (BULOG)</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>Zakat</td><td></td><td>Rp0,00</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp3.383.918,00</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21		Rp79.354,00	2	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp2.902.500,00	3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	6	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp402.064,00	7	Taparum		Rp0,00	8	Beras (BULOG)		Rp0,00	9	Zakat		Rp0,00	Jumlah			Rp3.383.918,00			
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																														
1	PPH 21		Rp79.354,00																																														
2	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp2.902.500,00																																														
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00																																														
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00																																														
5	Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00																																														
6	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp402.064,00																																														
7	Taparum		Rp0,00																																														
8	Beras (BULOG)		Rp0,00																																														
9	Zakat		Rp0,00																																														
Jumlah			Rp3.383.918,00																																														
Untuk Keperluan: Pembayaran Gaji Induk, Tunjangan dan lain sebagainya bulan Januari 2026, Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubal Kab. Muara Enim terdiri dari Pegawai 9 orang, Istri / suami 6 orang, anak 10 orang jumlah 25 jiwa Pembebanan Pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="3">NOMOR SPD: 16.03/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.01.0001</td> <td>Belanja Gaji Pokok PNS</td> <td>Rp33.225.360,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.02.0001</td> <td>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</td> <td>Rp3.055.896,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.03.0001</td> <td>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</td> <td>Rp2.830.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.04.0001</td> <td>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</td> <td>Rp360.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.05.0001</td> <td>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</td> <td>Rp735.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.06.0001</td> <td>Belanja Tunjangan Beras PNS</td> <td>Rp1.810.500,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.07.0001</td> <td>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</td> <td>Rp79.354,00</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.08.0001</td> <td>Belanja Pembulatan Gaji PNS</td> <td>Rp408,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp42.096.518,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 16.03/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp33.225.360,00	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp3.055.896,00	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp2.830.000,00	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp360.000,00	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp735.000,00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp1.810.500,00	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp79.354,00	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp408,00	Jumlah		Rp42.096.518,00	SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: right;">Rp42.096.518,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp3.383.918,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp38.712.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp42.096.518,00</td> </tr> </tbody> </table> Uang Sejumlah: (empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah)		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp42.096.518,00	Jumlah Potongan	Rp3.383.918,00	Jumlah Netto	Rp38.712.600,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp42.096.518,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																															
NOMOR SPD: 16.03/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026																																																	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																																	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																																	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp33.225.360,00																																															
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp3.055.896,00																																															
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp2.830.000,00																																															
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp360.000,00																																															
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp735.000,00																																															
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp1.810.500,00																																															
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp79.354,00																																															
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp408,00																																															
Jumlah		Rp42.096.518,00																																															
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp42.096.518,00																																																
Jumlah Potongan	Rp3.383.918,00																																																
Jumlah Netto	Rp38.712.600,00																																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp42.096.518,00																																																
Jumlah SPP Diminta Rp42.096.518,00 Nomor dan Tanggal SPP : 16.03/02.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.11.0000/01/2026, tanggal 02 Januari 2026	Muara Enim, 02 Januari 2026 PENGGUNA ANGGARAN <u>Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si</u> 198111112001121002																																																
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																																	

Gambar 5.5 Tampilan SPM (Surat Perintah Membayar) Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi dari user mengenai user interface SIPD Kabupaten Muara Enim maka didapatkanlah hasil sesuai kehendak *user* dengan tampilan SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah terdapat data pada Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP.

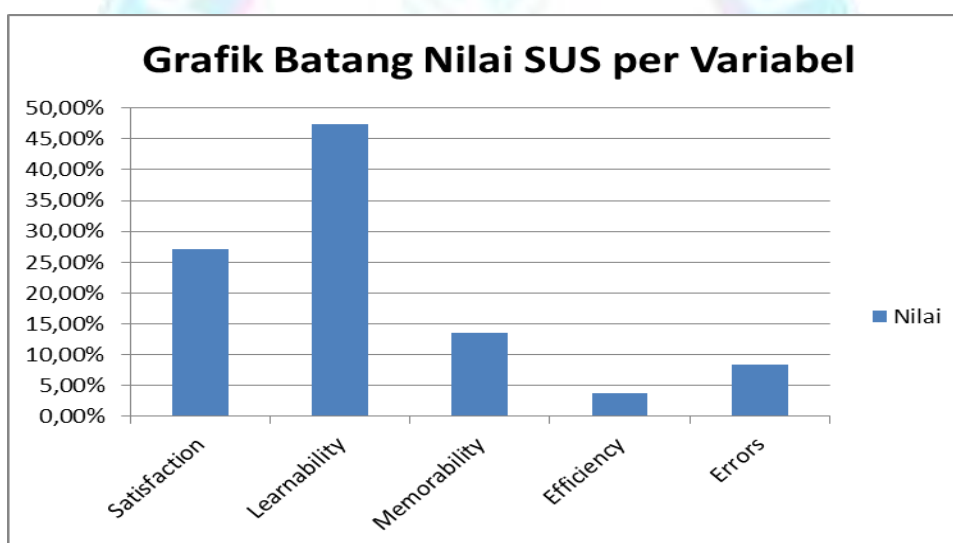
5.6 Hasil

Pada tahap ini, hasil responden sebanyak 55 ASN yang telah mengisi kuesioner melalui *google form* didapatkan tabel persentase nilai SUS per variabel dan diagram batang nilai SUS per variabel sebagai berikut :

Tabel 5.6 Tabel Persentase Nilai SUS per Variabel

Variabel	Persentase
<i>Satisfaction</i>	27,11%
<i>Learnability</i>	47,28%
<i>Memorability</i>	13,59%
<i>Efficiency</i>	3,72%
<i>Errors</i>	8,30%

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Satisfaction 27,11 %, Learnability 47,28%, Memorability 13,59%, Efficiency 3,72%, dan Errors 8,30 %. Adapun dapat digambarkan melalui grafik batang sebagai berikut :



Gambar 5.6 Grafik Batang Nilai SUS per Variabel

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa variabel *efficiency* menunjukkan nilai yang paling kecil yaitu 3,72%. *Efficiency* dapat disimpulkan dari hasil wawancara yaitu tampilan SPM yang belum menampilkan data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP yang membuat tidak efisiennya waktu yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan dan telah dibuat rekomendasi tampilan SPM oleh peneliti yang dapat dilihat di gambar 5.5.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti telah melakukan evaluasi terhadap SIPD Kabupaten Muara Enim dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara. Wawancara diberikan kepada 5 pengguna sistem SIPD Kabupaten Muara Enim, dan menyebarkan kuesioner *system usability scale (SUS)* ke 55 responden atau pengguna dari SIPD Kabupaten Muara Enim.
2. Evaluasi *user interface (UI)* SIPD Kabupaten Muara Enim menggunakan metode *system usability scale (SUS)* dan menguji validitas dan realibilitas. Hasilnya diketahui bahwa SIPD Kabupaten Muara Enim mendapatkan skor rata-rata sebesar 63.55. Nilai skor rata-rata SIPD tersebut berada pada peringkat **grades D** dengan *adjective ratings “Good”*. Selanjutnya untuk *acceptability ranges* masuk ke dalam kategori **“Marginal”** atau cukup diterima. Sedangkan untuk uji validitas dinyatakan layak untuk pengumpulan data penelitian dan hasil perhitungan uji realibilitasnya dikatakan reliabel dan konsisten sebagai alat pengumpul data penelitian. Semua tahapan dihitung menggunakan menggunakan program *SPSS for windows versi 23*. Dan dari hasil nilai SUS per variabel yang menunjukkan nilai variabel *efficiency* mendapatkan nilai yang paling rendah yaitu 3,72% dimana dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa masalah yang didapat ada pada tampilan SPM yang tidak menampilkan data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank, Nama Bank – Cabang, dan NPWP yang membuat tidak efisiennya waktu yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan dan telah dibuat rekomendasi tampilan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh peneliti yang dapat dilihat di gambar 5.5.

6.2 Saran

Berikut saran yang diberikan peneliti pada skripsi ini adalah untuk menu SPM diharapkan data Nama, No Rekening Bank, Nama di Rekening Bank , Nama Bank – Cabang dan NPWP dapat ditampilkan. Dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Analisa SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Kabupaten Muara Enim dari sisi *user experience (UX)*
2. Menggunakan metode analisis lain selain *System Usability Scale*



DAFTAR PUSTAKA

- Cantica, D. P., Jatmika, A. H., Huwae, R. B., & Ratnasari, D. (2024). Analisis Sistem Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggunakan System Usability Scale. *Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI)*, 5(1), 76–84. <https://doi.org/10.29303/jbegati.v5i1.1183>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Diana Ratna Sari, Agus Pitoyo, I. R. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Warung Pereng Kaliabank Kabupaten Kebumen*. 19.
- Feishal Azriel Arya Putra, Bibit Waluyo, Risqi Faturrohman, Wahyu Dwi Purwoprasetyo, & Ito Setiawan. (2025). Analisis Usability Testing Menggunakan Metode System Usability Scale terhadap Kepuasan Pengguna Website Kemahasiswaan Universitas Amikom Purwokerto. *Uranus : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(1), 121–130. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i1.673>
- Hamid., Fatimah, & Nuryaningsih. (2025). Buku Ajar Buku Ajar.
- Kholifah, Heryana, Nugraha, H. B. (2023). Analisis Usability Pada Aplikasi Himfo Menggunakan Metode System Usability Scale (Sus) (Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unsika). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(2), 1416–1422.
- Manullang, A. H., Aritonang, M., & Purba, M. J. (2021). Sistem Informasi Bimbingan Belajar Number One Medan Berbasis Web. *TAMIKA: Jurnal Tugas Akhir Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 1(1), 44–49. <https://doi.org/10.46880/tamika.vol1no1.pp44-49>
- Maria, F., & Sutabri, T. (2023). Pengukuran Kualitas Website E-Learning Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang dengan Metode Webqual Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Homepage: <https://journal> Pengukuran Kualitas Website E-Learning Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang . 1(2), 121–127. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i2.134>
- Mushofa, M., Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel:

Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5937–5948. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1992>

Nadia Kurniawan, C., Zaman, B., & Bahri, S. (2022). Analisis Usability Pada Website Ayomulai Menggunakan Metode System Usability Scale. *Jtriste*, 9(2), 90–102. <https://doi.org/10.55645/jtriste.v9i2.381>

Nurhakiki, M. R., Afridah, N., & Harini, D. (2024). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi Kasus Pada PT . AAE Outdoor Indonesia , Kecamatan Bulakamba , Kabupaten Brebes , Jawa Tengah). *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 2(3), 221–239.

Puteri Anindya Maulan, & Dendy Kurniawan. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Alat Tulis Kerja Berbasis Web Pada Ma Sabilunnajah. *Informatika: Jurnal Teknik Informatika Dan Multimedia*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.51903/informatika.v2i2.190>

Ramadhan, A. R., & Sutabri, T. (2023). *Analisa Website SIG Radar Cuaca Dengan Metode System Usability Scale (SUS) Pada UPT BMKG Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Homepage: https://journal Analisa Website SIG Radar Cuaca Dengan Metode System Usability Scale (SUS) . 1(2), 104–109. https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i2.126*

Sitorus, J. H. P., & Sakban, M. (2021). Sistem Adalah Suatu Kumpulan Atau Himpunan Dari Unsur, Komponen, Atau Variabel Yang Terorganisasi, Saling Berinteraksi, Saling Tergantung Satu Sama Lain, Dan Terpadu. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 5(2), 1–13. <http://bisantara.amikparbinanusantara.ac.id/index.php/bisantara/article/download/54/47>

Sugiyono. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 1(September), 110–116.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>

Wahyuni, D., & Hamzah, M. L. (2024). Website Usability Level Analysis Using The System Usability Scale Method And Post Study System Usability Questionnaire. *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 2(1), 52–58. <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id>

LAMP PIRAN



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Patra Nomor 50 Kota Prabumulih Sumatera Selatan Indonesia
Telepon 0713322417 / *fax* 0713322418
Website : www.unpra.ac.id Email : fasilkom.unpra@gmail.com

Prabumulih,

Yth. Koordinator Tim Verifikasi Judul Penelitian
Program Studi Sistem Informasi
di
Prabumulih

Melalui surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulya Harta
NIM : 202321026P
Program Studi : Sistem Informasi
Jenjang : Strata satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Prabumulih

Mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi proposal penelitian saya yang berjudul:

1. Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan
Kabupaten Muara Enim Terhadap Pengguna Menggunakan Metode System
Usability Scale

Dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian (1 eksemplar);
2. Surat keterangan telah memenuhi syarat mata kuliah oleh Ketua Program Studi;
3. Surat keterangan telah mengikuti PPKMB dan Pembekalan Tugas akhir oleh Kabag. Kemahasiswaan
4. Surat keterangan lunas biaya administrasi dari BAAK

Demikianlah surat permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Mulya Harta

*) Pengajuan Judul Tugas Akhir diurutkan sesuai dengan minat



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan A.Yani No.10 Telepon (0734) 422024
MUARA ENIM 31311

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 500.10.30.1 /257/BKBP-I /XII/ 2025

- Dasar :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 - 2 Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin Penelitian.
 - 3 Surat Dari Universitas Prabumulih Fakultas Ilmu Komputer No Surat : 122/FASILKOM/UNPRA/ST-SI/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Mulya Harta
Institusi : Universitas Prabumulih
Alamat : Jl.Patra No 50 RT 01 RW 03 Kel. Sukaraja Kec.Prabumulih Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bangsa : Indonesia
Judul Kegiatan : Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten muara Enim Terhadap Pengguna Dengan Metode System Usability Scale.
Waktu Penelitian : November 2025 s.d Februari 2026
Tujuan : Mengetahui tingkat Usability (Kemudahan Pengguna) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Persepsi Pengguna Menggunakan Metode System Usability Scale
Email / No hp : mulyaharta2009@gmail.com / 08117332200

Penelitian/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit /Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.

Tidak dibenarkan melakukan izin Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Izin Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.

Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

Apabila masa berlaku Surat Penelitian/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.

Setelah selesai kegiatan magang/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian / Survey / Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim

Surat Penelitian / Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan / Izin ini tidak mentaati / Mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 15 Desember 2025

AN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Dodli Hariadi, S.H
Penata (H/c)

NIP.1971032220060410031

Koran Yan :
Gubernur Sumatera Selatan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumatera Selatan
Kepala Muara Enim (sebagai laporan).
Kepala BPKAD Muara Enim
Kepala Muara Enim
Kata Prodi Universitas Prabumulih Fakultas Ilmu Komputer
Tug Bertanggungjawab



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mulya Harta
NIM : 202321026P
Judul : Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim
Terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*
pembimbing I : FAJRIYAH S.Kom., M.Kom

No	Tanggal	Tema	Jenis Revisi	Komentar	Lama Perbaikan	Paraf
1	28/04 ²⁶	BAB I. II		all		st
2	11/05 ²⁶	BAB IV		- Distribusi Jawaban Responden Per variabel	1 Revisi	st
3	12/05 ²⁶	BAB IV		all		st.
4		BAB V		- pengisian variabel - Penguasaan - Sumber Reliabel	1 Revisi	st.
5	20/05 ²⁶	BAB V		all		st
6	20/05 ²⁶	BAB VI		all		st.
7	22/05 ²⁶	Kelengkapan		all		st
8				all siap diujikan st		

Prabumulih, 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi


Yuntari Purba Sari, S.Kom, M.Kom

NUPTK. 2062766667230213

Dosen Pembimbing



FAJRIYAH, S.Kom., M.Kom

NUPTK. 1159766667237103



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mulya Harta
NIM : 202321026P
Judul : Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim
Terhadap Pengguna dengan Metode System Usability Scale
Pembimbing II : ARIANSYAH., M.Kom

No	Tanggal	Tema	Jenis Revisi	Komentar	Lama Perbaikan	Paraf
1	11/5/26	Revisi 1 - Revisi 2		Revisi		f.
2	12/5/26	Revisi 3 - Revisi 4		Ace		f.
3	12/5/26	Revisi 5		Revisi		f.
4	20/5/26	Revisi 6		Ace		f.
5	20/5/26	Revisi 7 - Revisi 8		Ace		f.
6	21/5/26	Revisi 9		Ace		f.
7		Siapa yang		Ace		f.
8						

Prabumulih, 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Yuntari Purba Sari, S.Kom, M.Kom

NUPTK. 2062766667230213

Dosen Pembimbing

ARIANSYAH, S.Kom., M.Kom

NUPTK. 9343759660130163



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Patra Nomor 50 Kota Prabumulih Sumatera Selatan Indonesia

Telepon 0713322417 Faximile 0713322418

Website : www.unpra.ac.id Email : fasilkom.unpra@gmail.com

Nama : Mulya Harta
Nim : 202321026P
Lokasi : Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 27 Oktober 2025

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

Identitas Narasumber

Nama /Jabatan :

1. Octy Anggarini, S.E., Ak (Kepala Sub Bidang Perbendaharaan)

Tanggal Wawancara : 27 Oktober 2025

No	Peneliti dan Informan	Pertanyaan dan Jawaban
1	Admin Berita Acara	
	Q1	Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?
	A1	Srta 1
	Q2	Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah?
	A2	Saya sudah menggunakannya kurang lebih selama lima tahun, sejak sistem ini mulai diimplementasikan di OPD kami
	Q3	Seberapa sering Anda menggunakan fitur-fitur utama dalam SIPD?
	A3	Hampir setiap hari kerja. Terutama untuk modul penatausahaan dan pelaporan keuangan rutin bulanan
	Q4	Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem ini akurat, relevan, dan tepat waktu untuk kebutuhan pekerjaan Anda?
	A4	Secara umum, informasinya cukup akurat, terutama jika data inputnya benar. Namun, terkadang ada keterlambatan dalam pembaruan data antar-modul, sehingga perlu rekonsiliasi manual. Tepat waktu atau tidaknya pelaporan juga sangat bergantung pada kecepatan sistem dan jaringan
	Q5	Apakah Anda mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses memasukkan data atau saat pelaporan pertanggungjawaban menggunakan sistem ini?
	A5	Kadang-kadang ada kesulitan, dan jika terjadi kesalahan input di awal, proses perbaikannya cukup rumit dan memakan waktu. Selain itu, kecepatan akses sistem seringkali lambat di jam-jam sibuk
	Q6	Apakah tersedia bantuan teknis (helpdesk) yang responsif dan mudah diakses saat Anda menghadapi kendala teknis?
	A6	Kami lebih sering mengandalkan tim IT internal atau grup WhatsApp. Respons dari tim helpdesk provinsi/pusat terkadang lambat, yang bisa menghambat proses kerja kami, terutama saat <i>deadline</i> pelaporan.
	Q7	Bagaimana pembatasan akses data atau peran pengguna diterapkan dalam sistem ini? Apakah setiap pengguna hanya bisa mengakses menu sesuai tugas dan fungsinya?
	A7	Ya, ada pembatasan yang jelas. Operator hanya bisa menginput, Kasubag Keuangan bisa memverifikasi, dan Kepala OPD bisa



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Patra Nomor 50 Kota Prabumulih Sumatera Selatan Indonesia

Telepon 0713322417 Faximile 0713322418

Website : www.unpra.ac.id Email : fasilkom.unpra@gmail.com

		menyetujui. Jadi, dari segi keamanan akses, sistem ini sudah cukup baik
	Q8	Setelah menggunakan sistem ini, apakah proses penatausahaan keuangan di OPD Anda menjadi lebih efisien dan transparan dibandingkan sebelumnya?
	A8	Dari segi transparansi, ya, karena semua data terpusat dan bisa diawasi. Dari segi efisiensi, belum sepenuhnya. Di awal implementasi justru lebih lambat karena proses adaptasi. Saat ini, efisiensi terasa jika tidak ada gangguan jaringan
	Q9	Secara keseluruhan, apa saran atau masukan Anda untuk pengembangan sistem informasi penatausahaan daerah ini ke depannya?
	A9	sosialisasi dan pelatihan lebih intensif, dan yang terpenting, perbaikan performa sistem agar lebih cepat dan stabil

Muara Enim,

**Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kab. Muara Enim**



(Octy Anggarini, S.E., Ak)

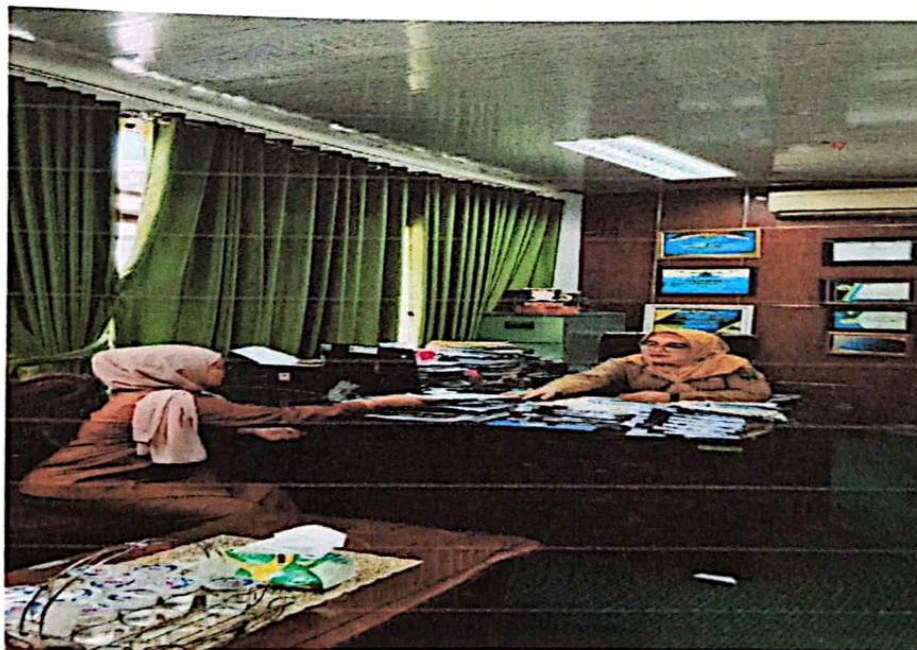
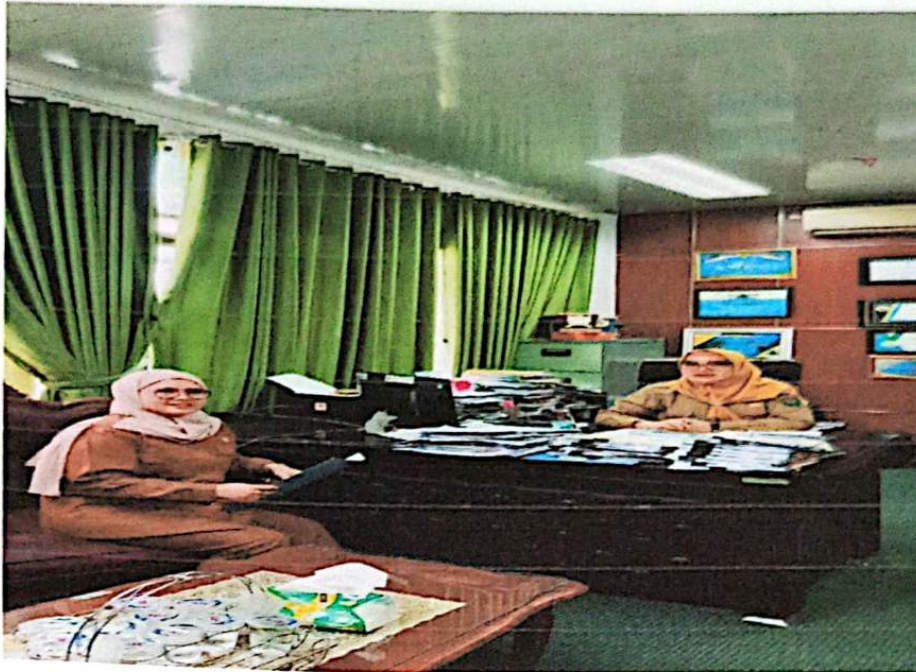
NIP. 197810172005012006



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Patra Nomor 50 Kota Prabumulih Sumatera Selatan Indonesia
Telepon 0713322417 *Faximile* 0713322418
Website : www.unpra.ac.id Email : fasilkom.unpra@gmail.com

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA PENELITIAN AWAL



Lembar Wawancara Penelitian Laporan Tugas Akhir

Nama : Mulya Harta

NIM : 202321026P

Prodi : Sistem Informasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer

Universitas : Universitas Prabumulih

Judul Penelitian " Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten

Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*
(SUS) "

➤ **Pertanyaan 1:**

1. Nama Responden: *Kosul Putri, SH*
2. Usia Responden : *81 tahun*
3. Pendidikan Terakhir : *SI*
4. Unit Kerja : *OPD Kecamatan Lufai 4114*

➤ **Pertanyaan 2:**

1. Sudah Berapa Lama Menggunakan SIPD? : *± 2 tahun*
2. Tujuan Menggunakan SIPD? : *Mengurangi kesalahan administrasi*

➤ **Pertanyaan 3:**

1. Dimana Biasanya Mengakses SIPD? : *Crom*
2. Seberapa Penting SIPD Bagi Bapak/ibu? : *Sangat penting, karena meminimalkan kesalahan.*
3. Kapan Biasanya SIPD Diperlukan? : *Pada saat Perampungan Sji & Laporan*
4. Seberapa Sering Mengakses SIPD? : *Hampir Setiap hari*

➤ **Pertanyaan 4:**

1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada SIPD? : *Pada menu SKM masih ada data yg belum tampil
Sebelum data nama, nama direkening bank, nomor rekening
nama bank / cabang.*

➤ **Pertanyaan 5:**

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Tampilan SIPD? : *Cukup baik*
2. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Menu-menu pada SIPD? : *cukup baik*
3. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Icon-icon pada SIPD? : *cukup baik*
4. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Layout/tampilan pada SIPD? : *Cukup baik*
5. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Button/tombol pada SIPD? : *Cukup baik*

Lembar Wawancara Penelitian Laporan Tugas Akhir

Nama : Mulya Harta

NIM : 202321026P

Prodi : Sistem Informasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer

Universitas : Universitas Prabumulih

Judul Penelitian " Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten

Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale* (SUS) "

➤ **Pertanyaan 1:**

1. Nama Responden: Ani Aniswati
2. Usia Responden : 24 Tahun
3. Pendidikan Terakhir : SI
4. Unit Kerja : Kecamatan Semende darat ulu

➤ **Pertanyaan 2:**

1. Sudah Berapa Lama Menggunakan SIPD? : 2 Tahun
2. Tujuan Menggunakan SIPD? : Meningkatkan Efisiensi Pekerjaan

➤ **Pertanyaan 3:**

1. Dimana Biasanya Mengakses SIPD? : Chrome
2. Seberapa Penting SIPD Bagi Bapak/ibu? : Sangat Penting karena dapat mengeluarkan anggaran program
3. Kapan Biasanya SIPD Diperlukan? : Pada saat menginput reg dan Pelebaran
4. Seberapa Sering Mengakses SIPD? : Hampir Setiap hari

➤ **Pertanyaan 4:**

1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada SIPD? : Pada Menu SPM masih ada data yang belum tampil yaitu, data nama, no rekening bank, nama di rekening bank, nama bank - Cabang

➤ **Pertanyaan 5:**

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Tampilan SIPD? : Cukup baik
2. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Menu-menu pada SIPD? : Cukup baik
3. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Icon-icon pada SIPD? : Cukup baik
4. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Layout/tampilan pada SIPD? : Cukup baik
5. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Button/tombol pada SIPD? : Cukup baik

Lembar Wawancara Penelitian Laporan Tugas Akhir

Nama : Mulya Harta

NIM : 202321026P

Prodi : Sistem Informasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer

Universitas : Universitas Prabumulih

Judul Penelitian " Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten

Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale* (SUS) "

➤ **Pertanyaan 1:**

1. Nama Responden: Nendri Megitasari
2. Usia Responden : 29 Tahun
3. Pendidikan Terakhir : St-Sarjana Ekonomi
4. Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Muara Enim

➤ **Pertanyaan 2:**

1. Sudah Berapa Lama Menggunakan SIPD? : 2,5 Tahun
2. Tujuan Menggunakan SIPD? : Menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

➤ **Pertanyaan 3:**

1. Dimana Biasanya Mengakses SIPD? : Microsoft Edge.
2. Seberapa Penting SIPD Bagi Bapak/ibu? : Sangatlah penting, untuk memastikan data yang akurat.
3. Kapan Biasanya SIPD Diperlukan? : Pada saat penginputan SPJ dan pelaporan.
4. Seberapa Sering Mengakses SIPD? : beberapa kali obtain seminggu untuk rutinitas dan pada saat ingin melakukan penginputan.

➤ **Pertanyaan 4:**

1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada SIPD? : Menu SPM masih ada data yang belum lengkap, yaitu data nama, nomor rekening bank, nama direk.bank, nama bank/cabang.

➤ **Pertanyaan 5:**

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Tampilan SIPD? : Cukup Baik
2. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Menu-menu pada SIPD? : Cukup Baik
3. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Icon-icon pada SIPD? : Cukup Baik
4. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Layout/tampilan pada SIPD? : Cukup Baik
5. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Button/tombol pada SIPD? : Cukup Baik.

Lembar Wawancara Penelitian Laporan Tugas Akhir

Nama : Mulya Harta
NIM : 202321026P
Prodi : Sistem Informasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Universitas : Universitas Prabumulih

Judul Penelitian " Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten
Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*
(SUS) "

➤ **Pertanyaan 1:**

1. Nama Responden: KHARISMA NISA
2. Usia Responden : 26
3. Pendidikan Terakhir : D3 komputerisasi administrasi
4. Unit Kerja : Kecamatan Lubal

➤ **Pertanyaan 2:**

1. Sudah Berapa Lama Menggunakan SIPD? : 1,5 tahun
2. Tujuan Menggunakan SIPD? : mengurangi kesalahan

➤ **Pertanyaan 3:**

1. Dimana Biasanya Mengakses SIPD? : Chrome
2. Seberapa Penting SIPD Bagi Bapak/ibu? : Sangat Penting, karena mengurangi kesalahan
3. Kapan Biasanya SIPD Diperlukan? : Pada Saat Penginputan SPJ dan pelaporan
4. Seberapa Sering Mengakses SIPD? : Hampir setiap hari

➤ **Pertanyaan 4:**

1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada SIPD? : menu SPJ masi ada data yg blm tampil yaitu data nama, no rekening bank, nama direkening bank, nama bank - cabang,

➤ **Pertanyaan 5:**

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Tampilan SIPD? : cukup baik
2. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Menu-menu pada SIPD? : cukup baik
3. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Icon-icon pada SIPD? : cukup baik
4. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Layout/tampilan pada SIPD? : cukup baik
5. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Button/tombol pada SIPD? : cukup baik

Lembar Wawancara Penelitian Laporan Tugas Akhir

Nama : Mulya Harta

NIM : 202321026P

Prodi : Sistem Informasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer

Universitas : Universitas Prabumulih

Judul Penelitian " Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten

Muara Enim terhadap Pengguna dengan Metode *System Usability Scale*
(SUS) "

➤ **Pertanyaan 1:**

1. Nama Responden: Deckie Persha
2. Usia Responden : 40 Tahun
3. Pendidikan Terakhir : S1
4. Unit Kerja : Kecamatan Karang Niru.

➤ **Pertanyaan 2:**

1. Sudah Berapa Lama Menggunakan SIPD? : 3 tahun
2. Tujuan Menggunakan SIPD? : Menciptakan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang efektif.

➤ **Pertanyaan 3:**

1. Dimana Biasanya Mengakses SIPD? : Chrome
2. Seberapa Penting SIPD Bagi Bapak/ibu? : Sangat penting. Karena memudahkan Evaluasi dan Monitoring.
3. Kapan Biasanya SIPD Diperlukan? : pada saat penginputan data SPJ dan pelaporan
4. Seberapa Sering Mengakses SIPD? : Diakses hampir setiap hari

➤ **Pertanyaan 4:**

1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada SIPD? : pada menu SIPM masih ada data yang belum tampil. seperti data nama, no. rekening bank, nama di rekening bank, nama Bank.

➤ **Pertanyaan 5:**

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Tampilan SIPD? : Cukup Baik
2. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Menu-menu pada SIPD? : Cukup Baik
3. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Icon-icon pada SIPD? : Cukup Baik
4. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Layout/tampilan pada SIPD? : Cukup Baik
5. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu Tentang Button/tombol pada SIPD? : Cukup Baik



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1114, 2019

KEMENDAGRI, SIPD, Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
14. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
15. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
17. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan

kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

20. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup SIPD meliputi:

- a. Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pasal 3

SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

Pasal 5

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pasal 6

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

BAB III**INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH****Pasal 7**

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu**Data Perencanaan Pembangunan Daerah****Pasal 8**

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
- a. Bappeda;
 - b. Produsen Data; dan/atau
 - c. Wali Data.
- (3) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan data paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Pasal 11

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf d, digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.

- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 16

Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kondisi geografis daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;

- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

BAB IV INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 17

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD.

Pasal 18

- (1) Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD; dan

- d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua
Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan Daerah

Pasal 19

- (1) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
 - d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
 - e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
 - f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 20

- (1) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.
- (2) Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;

- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keempat
Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Keuangan Daerah

Pasal 21

- (1) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik.
- (2) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
 - b. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

Bagian Kelima
Informasi Barang Milik Daerah

Pasal 22

- (1) Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;

- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan; dan
- j. penatausahaan.

Bagian Keenam
Informasi Keuangan Daerah Lainnya

Pasal 23

- (1) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.

BAB V

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

Pasal 24

- (1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:
 - a. informasi LPPD;
 - b. informasi EPPD; dan
 - c. informasi Perda.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Pasal 25

- (1) Informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

- (2) Dalam informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan EPPD berbasis elektronik.

Pasal 26

Informasi EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam EPPD berbasis elektronik.

Pasal 27

Informasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan hasil dari penetapan Perda.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap SIPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam SIPD, digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

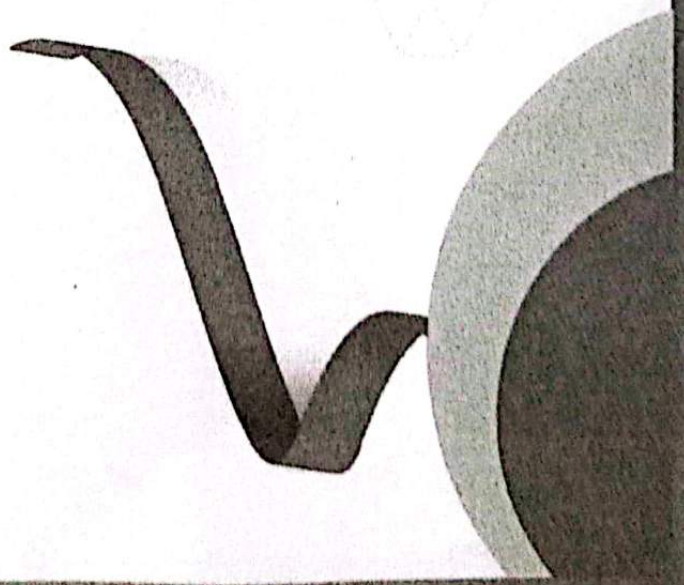
ttd

WIDODO EKATJAHJANA



SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) MODUL PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

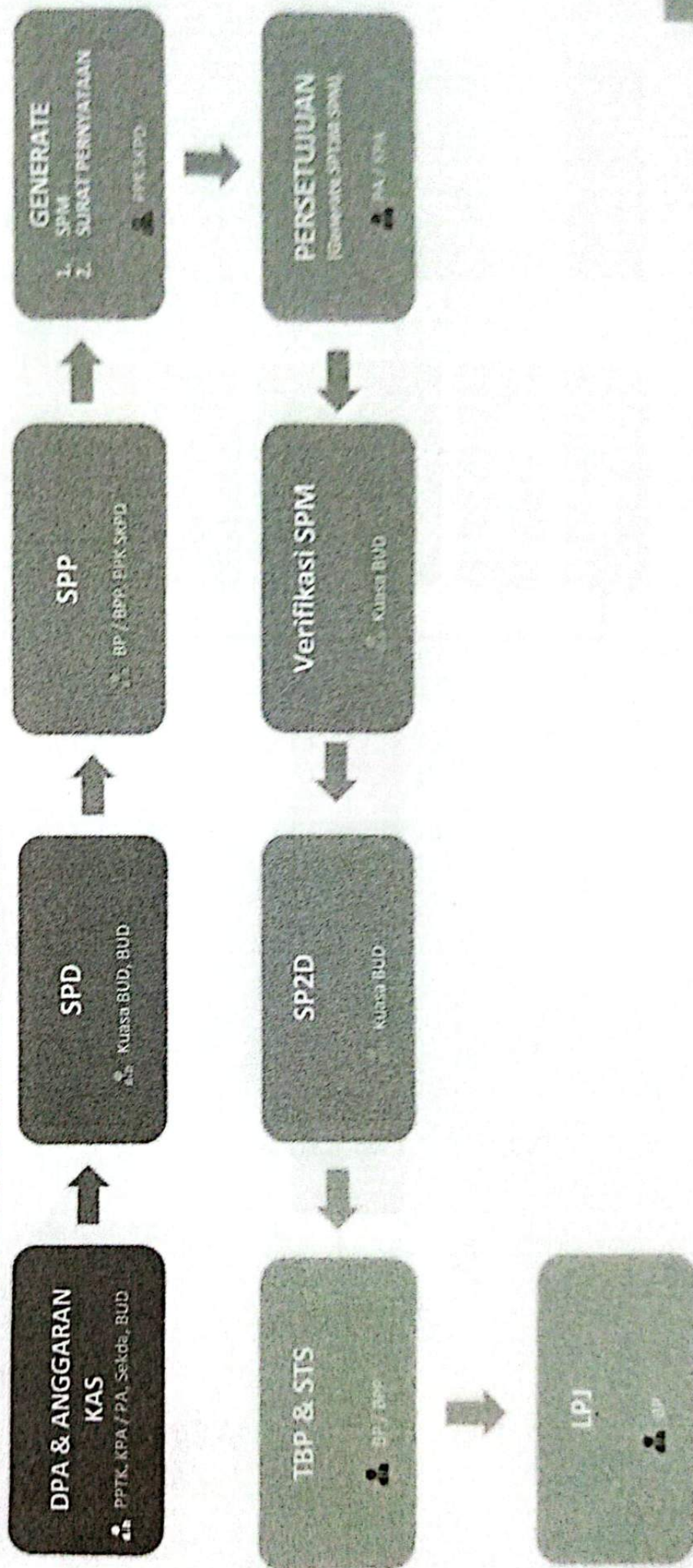
v.1.1



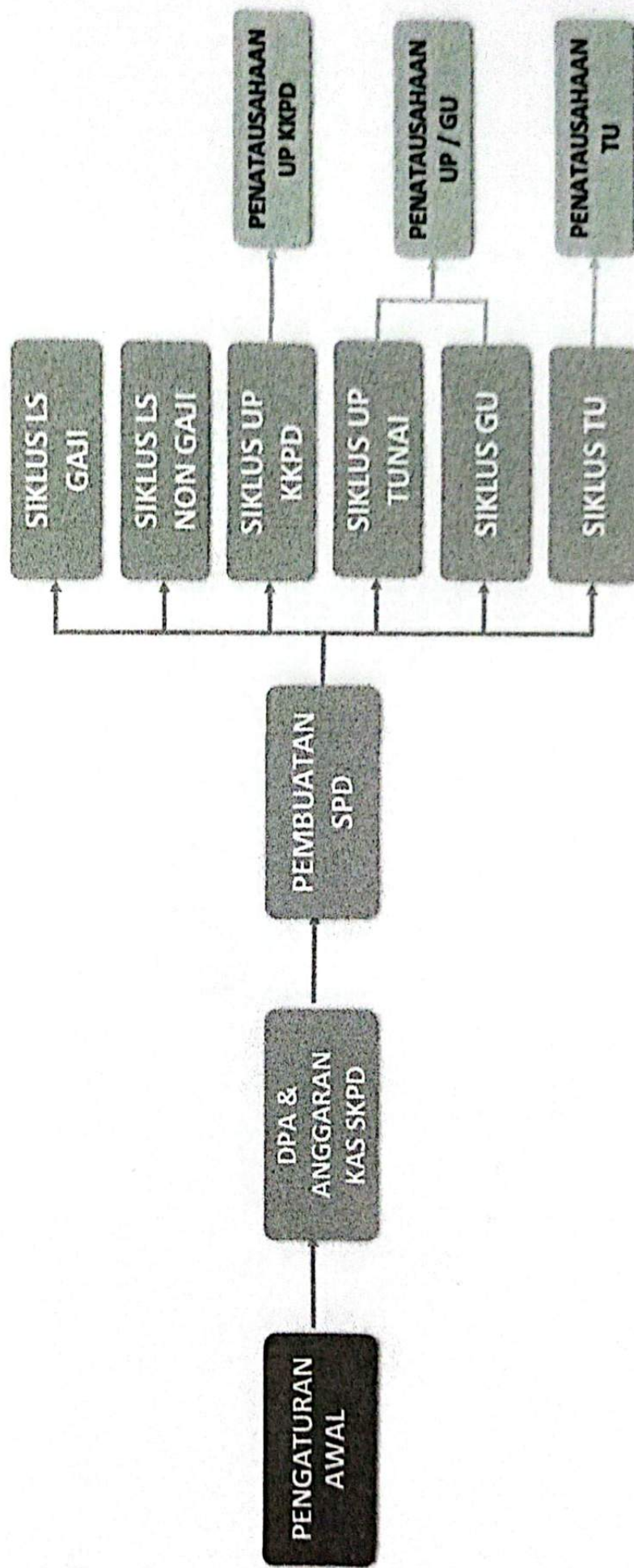
ALUR PEMBAHASAN

- Alur Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- Alur Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - ☐ Pengaturan Awal
 - ☐ Input DPA, Pelimpahan Kewenangan, Penugasan PPTK
 - ☐ Pembuatan SPD
 - ☐ Alur UP, LS, GU, TU

DOKUMEN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

LOGIN

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL

SIPD
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Provinsi Aceh

Selamat Datang di,

SIPD

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Sistem Informasi Keuangan Daerah
3. Sistem Informasi Manajemen Daerah
4. Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat
5. Sistem Informasi Lainnya

INFORMASI APLIKASI

INFORMASI KEMAHAN DAERAH

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Halaman Login Penatausahaan – Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia

1

SIPD
Mohon masukkan informasi akun Anda untuk mulai menggunakan SIPD

Tahun

Tahun 2024

Username / Nomor Induk Pegawai

2

Kata Sandi

3

☐ Show Input

Masok

Konfirmasi

X

Kami ingin memastikan Anda ingin masuk ke Aplikasi sebagai apa. Silakan pilih salah satu dari akun berikut untuk melanjutkan:

3

BENDAHARA UMUM DAERAH

PENGUNA ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Berdasarkan

1. Pada halaman login, input :

- Tahun Anggaran
- Username menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP)
- Kata Sandi

2. Klik tombol **Masuk** lalu sistem akan menampilkan pop up konfirmasi untuk memilih peran.

3. Klik tombol **Pilih Akun Ini** sebagai Bendahara Umum Daerah.

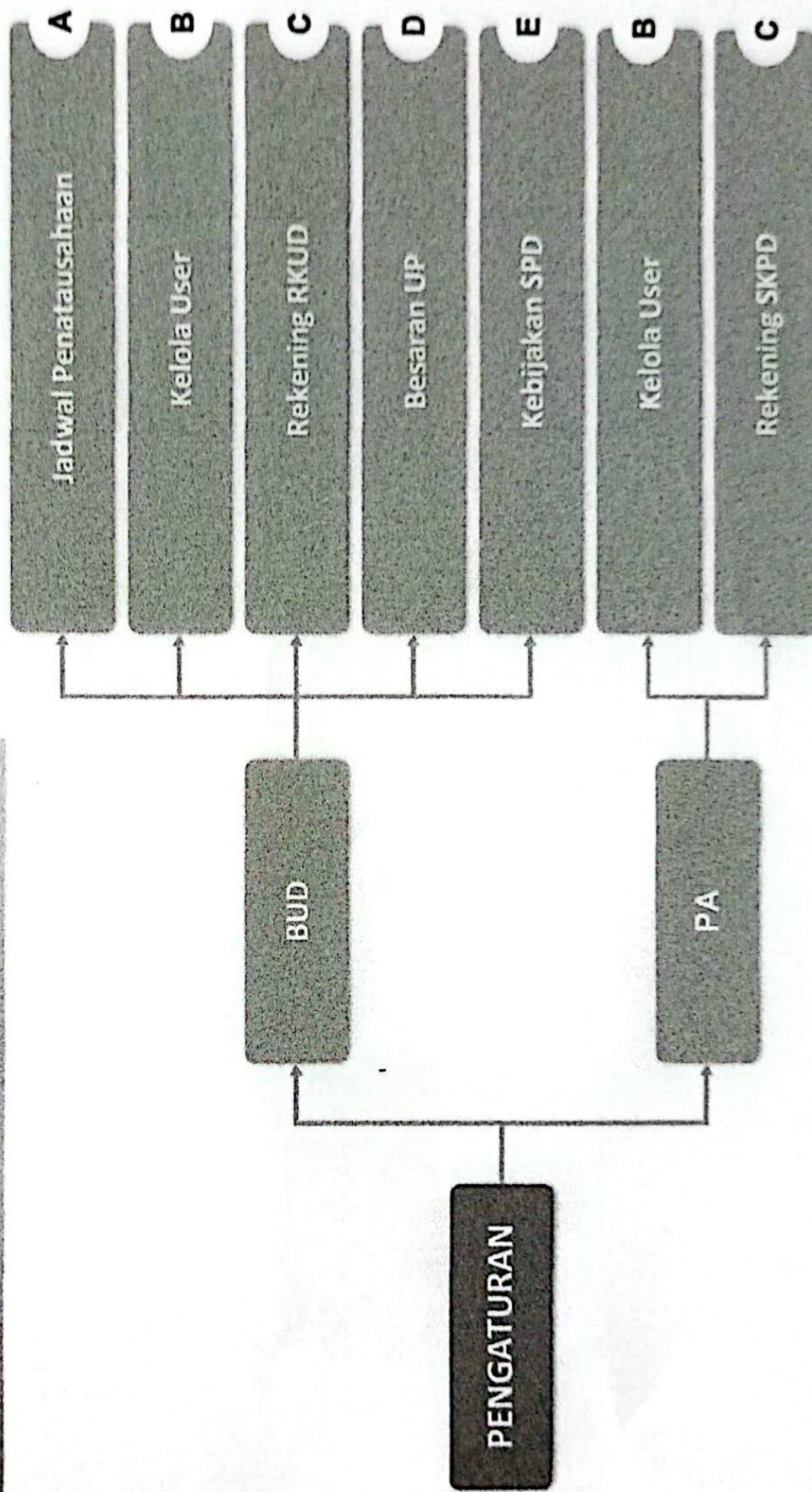


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

1. PENGATURAN AWAL

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL

1. PENGATURAN AWAL



A. Pembuatan Jadwal Penatausahaan

